

**LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA KEBIJAKAN *NORTHERN*
IRELAND PROTOCOL ERA BORIS JOHNSON**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

AURANETYA ADYA KAYANA

151180114

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2022

**LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA KEBIJAKAN *NORTHERN*
IRELAND PROTOCOL ERA BORIS JOHNSON**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH:

AURANETYA ADYA KAYANA

151180114

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : AURANETYA ADYA KAYANA
No.MAHASISWA : 151180114
JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA
KEBIJAKAN *NORTHERN IRELAND PROTOCOL*
ERA BORIS JOHNSON

Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

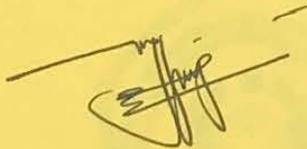
Hari
Tanggal

: RABU
: 24 AGUSTUS 2022

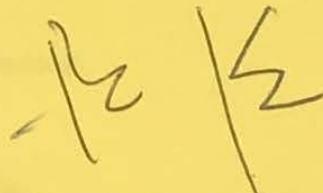
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK-UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Drs. Muharjono, M.Si
NIP.196109231994031001



Erna Kurniawati, SIP, M.Si
NIP.196712082021212002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AURANETYA ADYA KAYANA
No.MAHASISWA : 151180114
JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA KEBIJAKAN
NORTHERN IRELAND PROTOCOL ERA BORIS JOHNSON

Skripsi ini telah Ditahankan di depan Tim Penguji
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Agustus 2022
Waktu : 14.00-15.00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

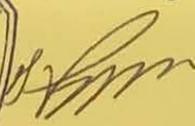
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA

TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I (Ketua)	Drs. Muharjono, M.Si
Dosen Pembimbing II (Anggota)	Erna Kurniawati, S.I.P., M.Si
Dosen penguji I (Anggota)	Ludiro Madu, S.I.P., M. Si
Dosen penguji II (Anggota)	Desi Nur Aini, MA



Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional


Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si

NIK. 196609172021211002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan



AURANETIYA ADYA KAYANA

151180114

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Latar Belakang diterbitkannya Kebijakan Northern Ireland Protocol era Boris Johnson”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si, selaku ketua jurusan Hubungan Internasional
2. Ibu Harmiyati, DRA, M.Si selaku dosen wali
3. Bapak Drs. Muharjono, M.Si, selaku pembimbing 1
4. Ibu Erna Kurniawati, SIP, M.Si selaku pembimbing 2
5. Bapak Ludiro Madu, S.IP., M. Si selaku Penguji 1
6. Ibu Desy Nur Aini, MA selaku penguji 2
7. Segenap Dosen Fakultas jurusan Hubungan Internasional UPN ‘Veteran Yogyakarta’ yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

AURANETYA ADYA KAYANA

151180114

ABSTRAK

British exit atau *Brexit* merupakan salah satu fenomena yang sangat diperdebatkan pada dunia politik. Sejatinya *Brexit* tidak hanya akan berdampak kepada politik dan ekonomi melainkan juga aspek territorial dan keamanan wilayah dari Inggris Raya. Irlandia Utara hadir pada masalah ini dikarenakan negara tersebut berbatasan langsung dengan salah satu negara Uni Eropa yaitu Republik Irlandia. Dalam hal ini memunculkan adanya kendala pada *withdrawal agreement* Inggris Raya terhadap Uni Eropa. Pada masa pemerintahan Theresa May mengeluarkan adanya proposal *Backstop* yang akan diterapkan pada perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia, namun pada akhirnya ditolak oleh parlemen Inggris Raya karena dinilai tidak merepresentasikan posisi yang baik dalam *Brexit*. Setelah mundurnya May pada Juli 2019 lalu digantikan oleh Boris Johnson. Dalam pergantiannya Boris Johnson mengeluarkan proposal baru yaitu *Northern Ireland Protocol* dimana dinilai dapat mengakomodir seluruh kepentingan aktor. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui studi pustaka beserta kerangka pikir pengambilan keputusan untuk memahami apa yang melatar belakangi penerbitan *Northern Ireland Protocol* era Boris Johnson.

Kata Kunci: *Brexit*, Inggris Raya, Uni Eropa, Perbatasan, Irlandia Utara

ABSTRACT

The British exit or Brexit is one of the most debated phenomena in the world of politics. Indeed, Brexit will not only have an impact on politics and the economy but also the territorial and territorial security aspects of the United Kingdom. Northern Ireland is present in this problem because the country is directly adjacent to one of the European Union countries, namely the Republic of Ireland. In this case, there are obstacles in the withdrawal agreement of the United Kingdom against the European Union. During the reign of Theresa May, she issued a Backstop proposal that would be applied to the border of Northern Ireland and the Republic of Ireland, but in the end it was rejected by the UK parliament because it was considered not to represent a good position on Brexit. After May's resignation in July 2019, he was replaced by Boris Johnson. In his turn, Boris Johnson issued a new proposal, namely the Northern Ireland Protocol which was considered to be able to accommodate all the interests of actors. This study uses qualitative analysis through literature study along with a decision-making framework to understand what was behind the publication of the Northern Ireland Protocol in the Boris Johnson era.

Keywords: Brexit, United Kingdom, European Union, Borders, Northern Ireland

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Argumen Pokok.....	16
F. Metode Penelitian.....	16
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
H. Jangkauan Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II <i>BRITISH EXIT</i> TERHADAP PERBATASAN IRLANDIA UTARA DAN REPUBLIK IRLANDIA.....	19

A.	<i>Central Border of Northern Ireland and Republic of Ireland</i>	19
B.	Permasalahan <i>Brexit</i> terhadap <i>Central Border</i>	24
a.	Permasalahan <i>Central Border</i> dalam <i>Brexit</i> melalui Sudut Pandang Inggris Raya serta arti pentingnya.....	28
b.	Permasalahan <i>Central Border</i> dalam <i>Brexit</i> melalui Sudut Pandang Uni Eropa serta arti pentingnya.....	30
C.	Tuntutan <i>Democratic Unionist Party</i> (DUP) terhadap Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia	32
D.	Upaya Boris Johnson terkait <i>Central Border</i> melalui <i>Northern Ireland Protocol</i>	34
 BAB III FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN <i>NORTHERN IRELAND PROTOCOL</i>		39
A.	<i>Northern Ireland Protocol</i>	39
B.	Faktor Pendorong Penerbitan <i>Northern Ireland Protocol</i>	43
1.	Faktor Internal	43
a.	Domestik	43
b.	Letak Geografis.....	48
c.	Keunikan Histori	53
2.	Faktor Eksternal	57
 BAB IV KESIMPULAN		60
 DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Letak *Central Border* antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia
- Gambar 1.2 Faktor-Faktor Pertimbangan Keputusan Kebijakan Luar Negeri menurut Richard C.Snyder
- Gambar 2.1 Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia
- Gambar 2.2 Presentase keluarnya Inggris dari Uni Eropa
- Gambar 2.3 *Timeline* Negosiasi Hubungan Baru antara Inggris Raya dan Uni Eropa
- Gambar 3.1 Gambaran perubahan kesepakatan dari *Backstop* menjadi *Northern Ireland Protocol*
- Gambar 3.2 Persentase Penolakan Kesepakatan Theresa May
- Gambar 3.3 Peta letak Inggris Raya dan Republik Irlandia
- Gambar 3.4 Titik Perbatasan pada Perbatasan Kepulauan Irlandia

DAFTAR SINGKATAN

CTA	: <i>Common Travel Area</i>
DUP	: Democratic Unionist Party
GFA	: <i>Good Friday Agreement</i>
IRA	: <i>Irish Republican Army</i>
MEE	: Masyarakat Ekonomi Eropa
NIA	: <i>Northern Ireland Assembly</i>
NIP	: <i>Northern Ireland Protocol</i>
PPN UE	: Pajak Pertambahan Nilai Uni Eropa
RUU UE	: Rancangan Undang-Undang Uni Eropa / <i>Withdrawal Agreement</i>
TEU	: <i>Treaty on European Union</i>
UE	: Uni Eropa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Northern Ireland Protocol (2019) merupakan salah satu kebijakan pengganti pada era Perdana Menteri Boris Johnson yang menopang stabilisasi perbatasan wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia pada masa keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. *Northern Ireland Protocol* adalah kebijakan untuk menjaga standar produk untuk menghindari pemeriksaan di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Saat keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (*Brexit*) pada 2016, harus ada terbentuknya kesepakatan spesial mengenai perbatasan Irlandia Utara bagian dari Inggris Raya dengan Republik Irlandia bagian Uni Eropa dalam masalah perdagangan dan menjaga perdamaian di dalamnya. Kesepakatan harus terbentuk karena kedua negara tersebut berada di satu pulau tetapi memiliki payung hukum yang berbeda untuk menjaga stabilitas perbatasan karena memiliki histori yang cukup kompleks.

Penyelesaian terhadap kesepakatan baru yang harus terbentuk tersebut sudah melalui proses resolusi pada era Perdana Menteri Theresa May pada tahun 2017 yang disebut *Backstop*. *Backstop* merupakan proposal yang mencantumkan bahwa Irlandia Utara akan tetap berada di *Single Market* dan Inggris Raya akan tetap berada di dalam *Common Custom Territory* yang sama dengan UE. *Backstop* akan tetap dimasukkan kepada proposal *Withdrawal Agreement* sebagai jaminan agar Inggris Raya tidak keluar secara unilateral. Perdebatan *Backstop* cukup sengit baik bagi parlemen Inggris maupun parlemen UE yang menyebabkan kegagalan *Backstop* sebanyak 3 kali untuk dimasukkan kedalam proposal *Withdrawal Agreement*.

Namun langkah perubahan terhadap proposal *Backstop* dilakukan dan digantikan dengan *Northern Ireland Protocol* pada era Boris Johnson. Kebijakan ini harus diambil karena akan berpengaruh dengan interaksi Inggris

Raya khususnya Irlandia Utara dengan Uni Eropa khususnya Republik Irlandia. Hal ini menjadi pembahasan menarik mengapa kebijakan *Northern Ireland Protocol* harus diterbitkan. Oleh karena itu perubahan kebijakan tersebut menarik di teliti untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terbitnya *Northern Ireland Protocol* terkait proposal *Brexit Withdrawal Agreement* pada era Boris Johnson.

B. Latar Belakang Masalah

Northern Ireland Protocol merupakan salah satu kebijakan pengganti yang diterbitkan pada era Perdana Menteri May dan diganti pada era Boris Johnson setelah menjadi Perdana Menteri Inggris Raya. Kebijakan *Northern Ireland Protocol* mencakup tentang bagaimana pemberlakuan peraturan perbatasan di Irlandia Utara dan Republik Irlandia dimana kedua negara tersebut memiliki payung hukum yang berbeda, Irlandia Utara yang masih tergabung dengan Inggris Raya dan Republik Irlandia yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa. *Northern Ireland Protocol* akan dimasukkan kepada RUU UE yaitu *Withdrawal Agreement* dalam kasus keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dalam konteks perbatasan di kedua negara tersebut.

Northern Ireland Protocol dinilai menjadi kebijakan yang perlu diterbitkan karena adanya faktor internal maupun eksternal dalam pengambilan kebijakan sebelumnya yaitu *Backstop* dimana diterbitkan pada masa Perdana Menteri May. Kebijakan *Backstop* (2017) dinilai memiliki potensi disintegrasi wilayah Irlandia Utara dengan Britania Raya (Wales, Inggris, Skotlandia) karena secara geografis hanya Irlandia Utara saja yang berada di luar kepulauan Britania Raya dan memunculkan banyak potensi ketidaksepakatan dari aspek politik hingga masyarakat. *Northern Ireland Protocol* yang mencakup peraturan perdagangan sangat diperlukan untuk dibahas karena Irlandia menjadi satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan negara anggota Uni Eropa yang mana Uni Eropa memiliki peraturan yang ketat pada keluar

masuk barang kepada wilayahnya. Selain itu *Northern Ireland Protocol* perlu untuk di terbitkan untuk menjaga stabilitas keamanan perbatasan karena adanya histori perang perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Awal dari pembahasan tersebut berasal dari *British exit* atau yang dikenal dengan *Brexit* merupakan penarikan keanggotaan Inggris Raya pada organisasi regional Uni Eropa (UE).¹ Uni Eropa terbentuk karena menginginkan adanya upaya integrasi kawasan Eropa melalui pembentukan institusi terbuka dan demokratis yang akan memberikan keuntungan bagi negara anggota seperti kerjasama ekonomi khususnya perdagangan dan investasi serta jaminan keamanan. Namun demikian, kerjasama ekonomi yang dijalin bersama Uni Eropa yang signifikan serta keuntungan bagi masyarakat diatas tidak mempengaruhi keputusan warga negara Inggris Raya untuk memilih keluar dari Uni Eropa.

Setelah adanya referendum diseluruh Inggris Raya pada 23 Juni 2016, hasil dari referendum tersebut adalah 51,89 persen memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dan 48,11 persen memilih untuk tetap menjadi anggota.² Inggris Raya menyatakan bahwa akan menarik diri dalam keanggotaan UE karena dinilai adanya kerugian oleh Inggris Raya jika meneruskan keanggotaannya. Kerugian tersebut adalah dimana adanya kewenangan blok yang dinilai akan mengikis kedaulatan Inggris Raya terutama dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Selain itu masalah imigran , dimana salah satu prinsip *Single Market (4 freedom, free movement of goods, capital, services, and people)* adalah pergerakan bebas (*Free movement*) setiap warga negara anggota serta adanya potensi secara ekonomi yang dinilai menghambat karena adanya wewenang yang lebih besar dalam UE

¹ BBC. 2020. “ *Brexit: What you need to know about the UK leaving EU*”. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887> . Diakses pada 9 Februari 2022

² Elise Uberoi. 2016. “ *Analysis of the EU referendum results 2016*”. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7639/>. Diakses pada 18 Februari 2022

mengatur hal tersebut.³ Hal ini memunculkan pandangan bahwa adanya keuntungan, dimana warga Inggris Raya bisa bekerja dimana saja disamping juga kerugian, dimana adanya imigran yang bisa berpindah tempat ke negara mana saja.

Theresa May, Perdana Menteri Inggris saat itu, mengumumkan keluarnya Inggris Raya kepada Uni Eropa dengan surat pada 29 Maret 2017 dengan menggunakan Pasal 50 ayat 2 kesepakatan Lisbon bahwa Inggris Raya akan keluar dari Uni Eropa.⁴ Pasal tersebut berbunyi:

*“2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.”*⁵ (“2. Suatu Negara Anggota yang memutuskan untuk menarik diri harus memberitahukan niatnya kepada Dewan Eropa. Mengingat pedoman yang diberikan oleh Dewan Eropa, Uni akan merundingkan dan menyimpulkan kesepakatan dengan Negara itu, menetapkan pengaturan untuk penarikannya, dengan mempertimbangkan kerangka kerja untuk hubungan masa depan dengan Uni. Persetujuan itu harus dirundingkan sesuai dengan Pasal 218(3) Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa. Itu akan disimpulkan atas nama Uni oleh Dewan,

³ European Commission. 2018. “Free movement – EU National”. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457>. Diakses pada tanggal 27 November 2021

⁴Anushka Asthana. 2017. “May Trigger Article 50 Without Warning of Consequence for UK”. <https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/29/theresa-may-triggers-article-50-with-warning-of-consequences-for-uk>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022

⁵ Tim Oliver. 2018. *Understanding Brexit*. Policy Press: Great Britain. hal 115

bertindak oleh mayoritas yang memenuhi syarat, setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa”).

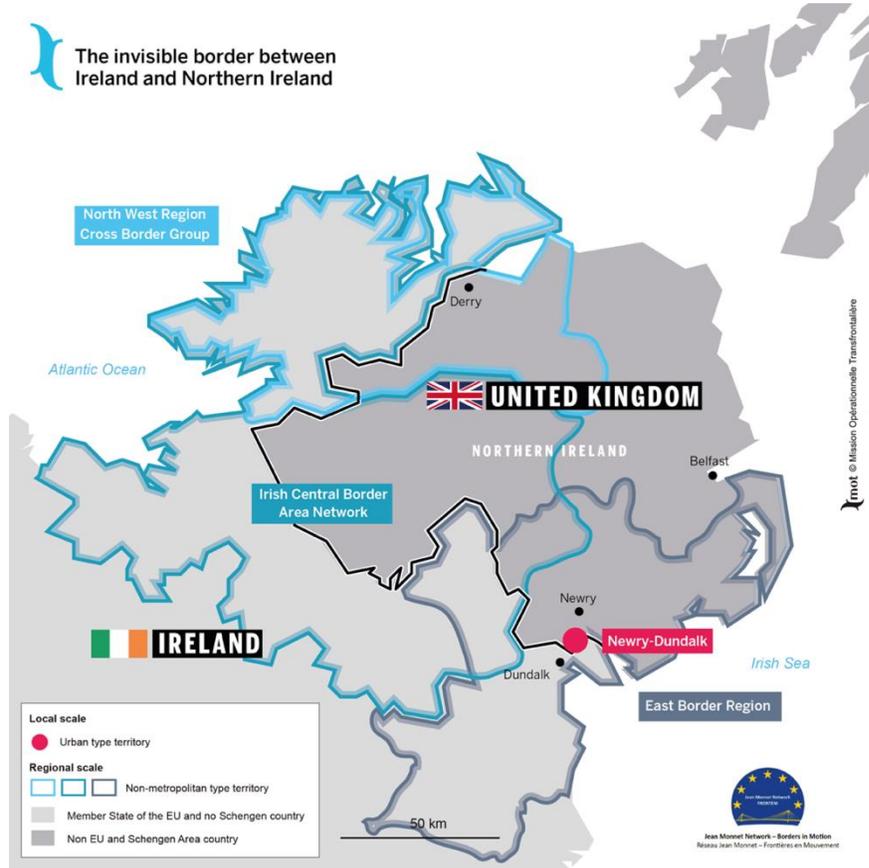
Pasal tersebut menyatakan bahwa jika Inggris Raya akan keluar dari UE harus melalui negosiasi dimana akan ada sebuah RUU UE sebagai hasil *Withdrawal Agreement* untuk hubungan dengan Uni Eropa kedepannya. RUU UE tersebut merupakan Penarikan Perjanjian/*Withdrawal Agreement* yang harus diratifikasi sebagaimana disepakati antara Inggris Raya dan Uni Eropa. RUU tersebut memastikan bahwa Inggris Raya dapat memenuhi kewajiban Internasionalnya dan meninggalkan UE dengan kesepakatan. Kewajiban internasional dan kesepakatan inilah yang akan dinegosiasikan lebih lanjut oleh Inggris Raya dan Uni Eropa. Salah satu kesepakatan yang dibahas di dalam negosiasi tersebut adalah perbatasan Irlandia Utara (Inggris Raya) dan Republik Irlandia (Uni Eropa).

Perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang dimaksud adalah *Central Border*. *Central Border* merupakan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia sepanjang 310 mil tanpa memiliki infrastruktur maupun petugas atau lebih dikenal sebagai *Invisible Border*. Dalam perbatasan ini mencakup delapan wilayah otoritas local yaitu: Kota Armagh, Banbridge dan Craigavon, Fermanagh dan Omagh, dan Mid Ulster di Irlandia Utara, ditambah Cavan, Donegal, Leitrim, Monaghan dan Sligo di Republik Irlandia. Delapan Wilayah perbatasan tersebut akan menerima akibat dari *Brexit* jika wilayah Irlandia Utara sebagai bagian dari wilayah yang keluar dari UE.⁶ Dalam wilayah perbatasan ini *Brexit* memberikan persoalan bagi otoritas lokal di Republik Irlandia dan Irlandia Utara dan perubahan yang terjadi tidak hanya

⁶ Katy Hayward, Milena Komarova. 2018. “*The Border Into Brexit*”. Queen’s University Belfast. Belfast. Hal 16

pada ‘titik masuk’ atau ‘pos pemeriksaan’ tetapi diseluruh komunitas disepanjang perbatasan seperti peta berikut. (lihat pada gambar 1)

Gambar 1.1. Letak *Central Border* antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia



Sumber: Center d’excellence Jean Monnet Strasbourg.” Border Case Studies”.

<http://centre-jean-monnet.unistra.fr/border-case-studies/> . Diakses pada 2

Maret 2022

Selama ini perbatasan tersebut telah damai dengan kebijakan yang menopang perdamaian-perdamaian tersebut. Dengan keluarnya Inggris Raya, termasuk Irlandia Utara dari UE dan sementara Republik Irlandia masih berada di UE, hal ini akan menciptakan adanya *External Border* dari yurisdiksi UE yang harus memiliki kesepakatan baru. Keluarnya Inggris Raya tidak hanya

mengancam ekonomi tetapi juga stabilitas perbatasan tersebut. Kesepakatan Inggris Raya dan UE harus bisa mengakomodasi penjagaan *Good Friday Agreement* dan tidak terbentuknya *Hard Border* karena dengan tidak mengakomodir kedua hal tersebut berpotensi munculnya gejolak di perbatasan Irlandia Utara (Inggris Raya) dan Republik Irlandia (Uni Eropa).

Pada 2017, upaya resolusi sudah dilakukan mengenai permasalahan ini dengan adanya Proposal *Backstop* yang diterbitkan oleh Uni Eropa pada era Theresa May. Proposal tersebut merupakan *Soft Border* (tidak adanya petugas dan perbatasan fisik hanya ada kesepakatan) di perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia untuk memudahkan arus perdagangan berupa barang dan jasa, sehingga tidak memerlukan pengawasan dan pemeriksaan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Dalam *Backstop* Irlandia Utara akan tetap menjadi anggota dari *European Union custom union* (kebijakan perdagangan non tarif antara sesama anggota) dan Irlandia utara akan tetap berada *single market* untuk ketentuan barang.

Michael Barnier (negosiator UE) mengajukan bahwa akan menjadikan *Backstop* menjadi jaminan dalam proposal *Withdrawal Agreement* dan di setuju oleh Theresa May. *Backstop* akan tetap dimasukkan kepada *Withdrawal Agreement* sebagai jaminan agar Inggris Raya tidak keluar secara unilateral. Namun demikian, May sadar bahwa proposal *Withdrawal Agreement* dengan memasukan *Backstop* di dalamnya gagal melewati parlemen sebanyak tiga kesempatan, hal ini membuatnya mengajukan pengunduran dirinya pada 7 Juni 2019.

Setelah Theresa May mengundurkan diri, Boris Johnson terpilih sebagai pemimpin partai Konservatif dan diangkat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 24 Juli 2019. Kesepakatan May yang masih dianggap sebagai solusi alternatif dan belum disepakati parlemen membuktikan bahwa solusi alternatif lain masih harus ditemukan untuk menghindari *Hard border* di pulau Irlandia dan memberikan Inggris Raya keluar dari UE dengan kesepakatan. Boris

Johnson berjanji untuk menyelesaikan *Brexit* dan mengubah versi baru yang akan lebih cocok untuk para pendukung *Hard Brexit* di dalam partainya.

“Keadaan unik di pulau Irlandia dan kebutuhan untuk mempertahankan kerja sama Utara Selatan, menghindari perbatasan yang keras dan melindungi Perjanjian 1998 dalam semua dimensinya” ditekankan dalam Protokol yang direvisi, terutama terkait dengan harapan diatas seperti yang asli (pasal 1, *Objective*).⁷ Dengan berdasarkan hal-hal tersebut Boris Johnson beserta Uni Eropa mengeluarkan kebijakan baru yang disebut *Northern Ireland Protocol*. *Northern Ireland Protocol* diterbitkan untuk memastikan bahwa tidak akan ada pemeriksaan di pulau Irlandia dan Irlandia Utara akan tetap berada diperaturan *single market* hanya untuk barang-barang serta memfasilitasi barang dari Irlandia Utara yang masuk ke pasar *Great Britain* maupun ketentuan perdagangan antara Irlandia Utara dan *Great Britain* kepada negara ketiga. Dalam kerangka baru ini perbatasan secara *de facto* akan dibuat di antara dua pulau di laut Irlandia. Kebijakan yang dibuat oleh Boris Johnson selebihnya sama dengan apa yang sudah ada di dalam *Backstop* tetapi ada beberapa kebijakan yang dirubah karena faktor internal dan faktor eksternal yang mendorongnya.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang, rumusan masalah yang diajukan ialah apa latar belakang diterbitkannya kebijakan *Northern Ireland Protocol* era Boris Johnson?

⁷ “Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from European Union and the European Atomic Energy Community”. Tersedia di web European Union Law. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12019W%2FTXT\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12019W%2FTXT(02)). Diakses pada 9 Februari 2022

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melihat, memahami serta menjawab pertanyaan pada kasus diatas akan menggunakan Teori *Decision Making* atau pengambilan keputusan. Teori Pengambilan keputusan digunakan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang di terbitkan oleh Boris Johnson dalam rangka kebijakan *Withdrawal Agreement* terkait perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Dalam konsep pengambilan keputusan Richard Snyder, membahas bahwa perilaku politik dapat dipengaruhi oleh sistem domestik (Internal) dan sistem internasional (Eksternal), kedua hal tersebut akan di pertimbangkan negara dalam mengambil keputusan. Dinamika interaksi oleh pihak internal dan eksternal membentuk preferensi negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dalam faktor internal lebih mengarah kepada kondisi ekonomi, posisi geografis, politik domestik, opini publik, dan kekuatan nasional sedangkan faktor eksternal lebih menekankan pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara.⁸

Asumsi dasar Richard Snyder yaitu bahwa tindakan internasional merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang di buat dimana para pemimpin negara baik individu maupun kelompok akan bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan politik luar negeri untuk pengambilan keputusan menurut Richard Snyder adalah:

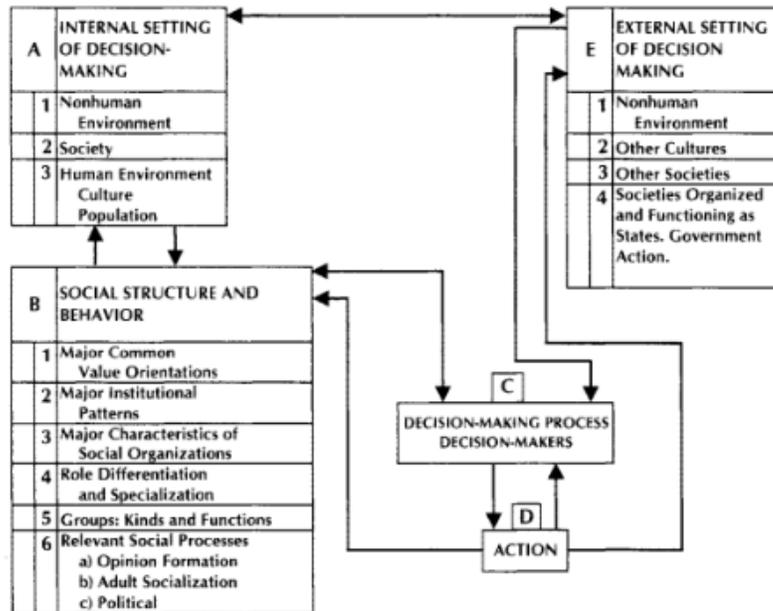
1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma- norma yang dianut)
2. Arus informasi diantara mereka
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri

⁸ Alex Mintz. *Op. cit.* Hal 121-132

4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (occasion for decision) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Oleh karena itu model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sangat kompleks, dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Akan tetapi dalam hal ini sangat berpengaruhnya faktor internal dan eksternal akan sangat mempengaruhi pembuatan keputusan. Teori yang telah di rumuskan oleh Richard Snyder dapat digunakan dalam menjelaskan mengapa *Northern Ireland Protocol* diterbitkan Boris Johnson, dimana dalam pengambilan keputusan menitik beratkan kepada keadaan politik internal Inggris Raya dengan Irlandia Utara dan bagaimana reaksi partai yang condong terhadap Irlandia Utara serta faktor eksternal dimana keluarnya Inggris Raya dari UE harus mengakomodir kepentingan UE terkait kasus perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Gambar 1.2. Faktor-Faktor Pertimbangan Keputusan Kebijakan Luar Negeri menurut Richard C.Snyder



Sumber: Richard C.Snyder,H.W. Bruck, Burton Sapin.2002. *Foreign Policy Decision Making (Revisited)*. Hampshire: Palgrave. hal 64

Faktor internal seperti politik domestik lebih mengacu kepada kondisi peran partai politik yang mempengaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik partai politik akan disorot dalam peran proses pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pemerintahan. Partai politik berusaha mencapai kepentingan mereka dalam persaingan satu sama lain maka mereka akan mendukung isu-isu untuk memenangkan suara semaksimal mungkin.⁹ Letak geografis merupakan salah satu faktor pertimbangan pada pengambilan keputusan. Seperti pada *Withdrawal Agreement* untuk perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia, letak geografis menjadi salah satu spektrum utama karena jika tidak ada kebijakan yang menopang lalu lintas perbatasan tersebut

⁹ Yang Xing. Opcit Hal 42

akan ada kemungkinan instabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu letak geografis patut di pertimbangkan untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan negara. Faktor Internal yang terakhir merupakan keunikan histori yang dimiliki sebuah negara. Pengalaman baik dan buruk akan memiliki dampak besar dalam membentuk budaya politik suatu negara. Faktor keunikan histori ini dapat diaplikasikan pada pemeliharaan *Good Friday Agreement* dalam *Withdrawal Agreement* karena histori tersebut yang menopang seluruh negosiasi yang ada.

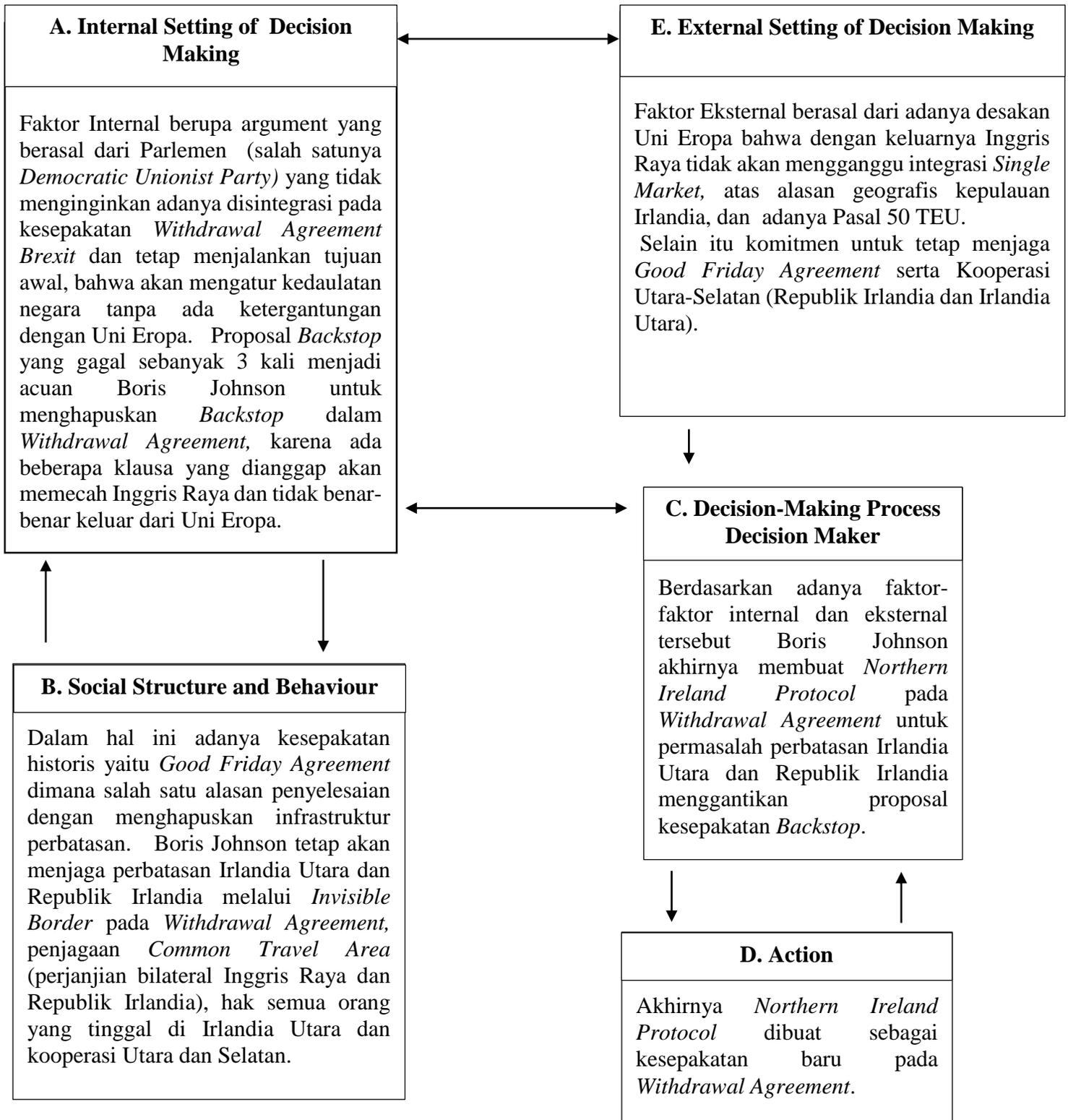
Pada faktor Eksternal, kondisi internasional sangat mempengaruhi seperti aksi dan reaksi negara lain dan campur tangan dari organisasi internasional dan regional. Kehadiran organisasi internasional seperti PBB, organisasi regional dan sebagainya akan mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Tekanan dari organisasi internasional mungkin saja terjadi ketika organisasi tersebut menekan negara untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan tersebut dapat mempengaruhi preferensi negara .¹⁰

Dengan kerangka berpikir menggunakan teori yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model pembuatan keputusan politik luar negeri, dapat digunakan dalam menjelaskan perubahan kesepakatan *Withdrawal Agreement* mengenai perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia dengan menitik beratkan pada faktor internal dan faktor eksternal. Solusi *Backstop* (2018) yang akan dimasukkan kedalam *Withdrawal Agreement* diubah karena adanya faktor pendorong secara internal dan eksternal. Dorongan tersebut yang menyebabkan pergantian oleh perdana menteri Boris Johnson berupa kesepakatan baru yaitu *Northern Ireland Protocol*.

¹⁰ Gerry Van der Kamp-Alons. 2005. „The State between Internal and External Pressure”. Radboud University of Nijmegen. (tidak dipublikasikan).The Netherlands. Hal 19-21

Berdasarkan bagan teori milik Richard Snyder bahwasannya dapat diaplikasikan kepada suatu proses keputusan politik luar negeri Inggris Raya dalam masalah *Withdrawal Agreement* perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia dapat di gambarkan sebagai berikut:

Pengaplikasian Bagan Teori Richard Snyder



Berdasarkan pada bagan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pengambilan keputusan Boris Johnson dalam menerbitkan *Northern Ireland Protocol* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Domestik: DUP sebagai salah satu partai dari Irlandia Utara menjadi salah satu acuan utama dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan baru bagi Irlandia Utara. Selain itu partai ini pendukung *hard brexit* dan sangat mendukung keputusan untuk menggantikan *Backstop*. *Northern Ireland Protocol* dapat mengkomordir agar Irlandia Utara tetap berada di wilayah zona ekonomi Inggris Raya. Dengan itu tujuan Boris Johnson untuk penjagaan *Good Friday Agreement* terlaksana dan agar tidak adanya *Hard Border* di wilayah kepulauan Irlandia.
- b. Letak Geografis: Irlandia Utara sebagai salah satu perbatasan darat langsung dengan Uni Eropa harus memiliki kebijakan perdagangan yang baru karena sudah tidak memiliki satu kesepakatan di bawah Uni Eropa,
- c. Keunikan Histori: Irlandia Utara dan Republik Irlandia memiliki keunikan histori dalam penanganan perbatasan dikarenakan pernah terjadinya perang *The Trouble* yang di selesaikan dengan keluarnya kesepakatan *Good Friday Agreement*. *Good Friday Agreement* yang merupakan kesepakatan yang ingin dijaga saat keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa

2. Faktor Eksternal

Dorongan Internasional yaitu desakan dari Uni Eropa. Uni Eropa menginginkan tidak adanya disintegrasi *Single Market* dan *Custom Union* serta tetap adanya pembahasan hubungan kedepannya antara Inggris Raya dan Uni Eropa.

E. Argumen Pokok

Berdasarkan latar belakang, kerangka pikir yang digunakan, maka Latar belakang Boris Johson menerbitkan *Northern Ireland Protocol* adalah sebagai berikut:

Adanya faktor internal seperti politik domestik, letak geografis, dan keunikan histori serta adanya faktor eksternal yang berupa desakan dari Uni Eropa.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan di susun menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif akan digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Untuk menunjang penelitian, pengambilan data akan menggunakan metode *library research* atau studi pustaka. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi dan data yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹¹ Selain itu, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan data empiris yang diperoleh berupa data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian kualitatif juga berangkat dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah kesimpulan.

¹¹ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:Refika Aditama. Bandung. 2009. Hal 259

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya *Northern Ireland Protocol* sebagai kebijakan yang menggantikan *Backstop*. Dalam hal ini dengan mengetahui apa latar belakang diterbitkannya *Northern Ireland Protocol* dapat memberikan manfaat untuk memberikan pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hubungan Internasional dan juga kepada masyarakat akademik.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada periode tahun 2016-2019. Tahun 2016 dipilih sebagai awal penelitian karena keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa menjadi awal dari pembahasan kebijakan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Sementara batas akhir penelitian yang ditetapkan penulis hingga 2019 karena pada 2019 *Backstop* di tolak sebanyak 3 kali oleh parlemen yang menyebabkan kemunduran Theresa May serta Perdana Menteri Boris Johnson sudah mengeluarkan *Northern Ireland Protocol* pada Oktober 2019.

I. Sistematika Penulisan

Bab I akan terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Argumen Pokok, Metode Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II deskripsi mengenai permasalahan Brexit terhadap *Central Border* dari pihak Inggris Raya dan pihak UE serta arti penting *Central Border* bagi Inggris Raya dan Uni Eropa. Selain itu, deskripsi tuntutan DUP dan upaya Boris Johnson terkait *Central Border*, melalui *Northern Ireland Protocol*.

Pada Bab III membahas dan membuktikan faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong *Northern Ireland Protocol*.

Bab IV, penulis akan menyampaikan kesimpulan

BAB II

BRITISH EXIT TERHADAP PERBATASAN IRLANDIA UTARA DAN REPUBLIK IRLANDIA

Sebelum menjelaskan latar belakang diambilnya kebijakan *Northern Ireland Protocol* pada perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia, diperlukan pemahaman terkait dinamika situasi dan kondisi diperbatasan tersebut. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan dari histori mengapa Irlandia Utara dan Republik Irlandia menjadi dua negara yang berbeda, *Brexit* dan kedudukan Inggris Raya serta UE dalam masalah ini, tuntutan *Democratic Unionist Party* (partai politik Irlandia Utara) terhadap solusi yang akan ditempatkan pada *withdrawal agreement*, serta upaya apa saja yang dilakukan Boris Johnson melalui *Northern Ireland Protocol*.

A. *Central Border of Northern Ireland and Republic of Ireland*

Central Border atau yang biasa dipahami sebagai perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia merupakan satu-satunya perbatasan daratan di dalam kasus keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. Perbatasan sepanjang 310 mil yang memiliki kurang lebih 200 pos pemeriksaan serta terdiri dari beberapa pemukiman yang berada di kedua wilayah perbatasan. Perbatasan tersebut merupakan perbatasan terbuka, tidak memiliki infrastruktur dan penjaga diperbatasan, karena adanya nilai-nilai yang diterapkan dari keanggotaan dua negara tersebut dalam keanggotaannya di Uni Eropa yaitu „*Four Freedom*“. *Central Border* sendiri meliputi 8 otoritas lokal yaitu Kota Armagh, Banbridge dan Craigavon, Fermanagh dan Omagh, dan Mid Ulster di Irlandia Utara, ditambah Cavan, Donegal, Leitrim, Monaghan dan Sligo di

Republik Irlandia. Dalam hal ini semua pergerakan lintas perbatasan pada perbatasan terbuka dimana tidak ada infrastruktur perbatasan sama sekali.¹

Gambar 2.1. Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia



Sumber: Chris Morris. 2017. Brexit Countdown: Why is Northern Ireland border question so hard?. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-42180074> . Diakses pada 12 Juli 2022

Seperti yang terlihat pada gambar 3, gambar ini menggambarkan bahwa tidak adanya perbatasan fisik seperti administratif dan bangunan. Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia hanya dibedakan oleh ketentuan kecepatan dimana pada Irlandia Utara menggunakan mil/jam dan pada Republik Irlandia km/jam. Dengan adanya potensi perbatasan keras, hal ini juga akan menyulitkan para masyarakat yang akan berpindah dari Irlandia Utara ke Republik Irlandia dan sebaliknya. Perbatasan keras sangat ditolak untuk menjadi solusi keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.

Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang berada di satu pulau memiliki histori keterpisahan terhadap kedudukannya di dalam Inggris Raya. Undang-Undang Pemerintah Irlandia (1920) yang pertama kali membagi pulau itu

¹ Katy Hayward. 2017. “ The Irish Border and Brexit: An Explainer , parts I & II”.<https://www.qub.ac.uk/brexit/Brexitfilestore/Fileupload,737794,en.pdf>. Diakses pada 12 Juli 2022

menjadi dua yurisdiksi terpisah, masing-masing dengan pemerintah dan parlemennya sendiri. Pemisahan tersebut dianggap sebagai masalah internal Inggris Raya dan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan tentang kedaulatan yang diperebutkan diseluruh pulau. Perbatasan tersebut sebagian besar didominasi oleh Unionis dengan mayoritas penduduk Protestan.

Perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia diperkenalkan pertama kali dengan adanya *The Irish Free State 1922*. *Irish Free State* merupakan keluarnya Republik Irlandia dari Kerajaan Inggris karena Republik Irlandia merupakan salah satu kesatuan dari Inggris Raya dimana dikenal sebagai *United Kingdom of Great Britain and Ireland* pada tahun 1801-1922 dibawah *Acts of Union 1800*. Keluarnya Irlandia tersebut ditandatangani dalam perjanjian *Anglo-Irish Treaty 1922* yang menyelesaikan perang independen Irlandia antara *Irish Republican Army (IRA)* dan *British Crown force*.² Dalam *Anglo-Irish Treaty 1922* memberikan Irlandia Utara, yang telah dibuat oleh Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920, opsi untuk memilih keluar dari Negara Bebas Irlandia, yang dilaksanakan oleh Parlemen Irlandia Utara. Hal ini juga berkesinambungan dengan tahun 1922, setelah satu tahun perang saudara di selatan, pemerintah Irlandia Utara yang didominasi serikat pekerja menggunakan haknya untuk tidak dimasukkan ke dalam *Irish Free State*, dan perbatasan secara resmi menjadi perbatasan internasional. Seiring waktu, solusi tersebut diambil dengan bentuk konkret dengan adanya penghalang pabean dan perbatasan keamanan serta kesenjangan politik dan simbolis.

Adanya pembentukan *Common Travel Area (CTA)* pada tahun 1923 (termasuk seluruh pulau Irlandia dan Inggris Raya, ditambah Kepulauan Channel dan Isle of Man) merupakan tanggapan terhadap kesulitan mengelola perbatasan darat yang baru diberlakukan di wilayah yang secara resmi berada

² History.Com Edito.2022."Irish Free State Declared". <https://www.history.com/this-day-in-history/irish-free-state-declared>. Diakses pada 11 Juni 2022

di bawah aturan tersebut. Dari negara Inggris memungkinkan warga negara untuk bepergian dengan bebas melintasi dan di antara pulau-pulau ini tanpa persyaratan paspor. Hal ini dikarenakan CTA dalam UK's Ireland Act of 1949, menyatakan bahwa Irlandia 'bukan negara asing', oleh karena itu dalam istilah hukum, perjalanan relatif tidak terhalang dan hak-hak penduduk dianggap memiliki tingkat kesamaan dan timbal balik yang tinggi antara kedua pulau dan kewarganegaraan Inggris dan Irlandia.

Selain itu, histori yang berada di dalam perbatasan kepulauan Irlandia adalah penghapusan infrastruktur militer seperti menara pengawas Angkatan Darat Inggris Raya yang diturunkan pada tahun-tahun setelah penandatanganan Perjanjian Belfast atau *Good Friday Agreement* (GFA) pada tahun 1998. Penandatanganan GFA merupakan resolusi dari *The Troubles*, salah satu konflik yang terjadi di perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang dikarenakan oleh kelompok Unionis dan Nasionalis. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena Irlandia Utara memisahkan diri dari kepulauan Irlandia pada tahun 1922 dengan adanya *Anglo Treaty*. Populasi di kepulauan Irlandia terbagi menjadi dua:

- a. Unionis: lebih condong untuk tetap menjadi bagian dari Inggris. Beberapa dari mereka juga disebut Loyalis karena mereka setia kepada mahkota Inggris. Kebanyakan dari pendukungnya merupakan pemeluk protestan.
- b. Nasionalis: Ingin Irlandia Utara merdeka dari Inggris dan bergabung dengan Republik Irlandia. Beberapa dari mereka juga disebut Republik karena mereka ingin Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia. Kebanyakan dari pendukungnya merupakan pemeluk Kristen.

The Troubles terjadi karena kelompok loyalis yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan rumah dan pekerjaan sehingga mereka melakukan aksi protes sedangkan kelompok unionists sangat mendominasi kedudukan pemerintahan. Pada tahun 1960-an ketegangan antara unionis dan nasionalis berubah menjadi keras dengan hasil adanya *The Troubles*. Terjadi banyak pertempuran dari kedua belah pihak dari tahun 1970-an hingga 1990-an dengan menewaskan banyak orang dalam kekerasan tersebut. Dalam mengatasi konflik ini pasukan Inggris dikirim ke daerah tersebut, tetapi mereka terlibat konflik dengan kelompok bersenjata Republik yaitu IRA. IRA merupakan organisasi paramiliter republik yang mencari pendirian republik, akhir pemerintahan Inggris di Irlandia Utara, dan penyatuan kembali Irlandia. Pada penyerangan di wilayah perbatasan tersebut IRA melakukan pemboman di Inggris dan Irlandia Utara, layaknya juga Loyalis Bersenjata yang juga melakukan kekerasan. IRA secara khusus menargetkan polisi dan tentara dari tentara Inggris yang berpatroli di jalan-jalan. Situasi menjadi jauh lebih buruk pada tahun 1972, ketika 14 orang dibunuh oleh pasukan Inggris selama pawai hak-hak sipil damai yang dipimpin oleh Katolik dan Republik di Londonderry.³ Konflik tersebut dikenal sebagai Minggu Berdarah atau *Bloody Sunday* dan selama bertahun-tahun kemudian banyak yang meragukan bahwa mungkin untuk membawa perdamaian ke Irlandia Utara

Pada tahun 1998 adanya sebuah perjanjian yang bernama *Good Friday Agreement* pada 10 April 1998 dimana perjanjian tersebut mengenai konflik Republikan dan Loyalis dimana kedudukan dari kedua aktor tersebut bertolak belakang pada permasalahan penempatan kekuasaan Irlandia Utara.⁴ *Good Friday Peace Agreement* merupakan salah satu resolusi dari konflik tersebut dimana

³ BBC. 2018. What was the Good Friday Agreement? <https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775>. Diakses pada 28 Maret 2022.

⁴----.2018."What was the Good Friday Agreement" <https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

adanya *power-sharing* antara republikan dan loyalis dalam menjalani pemerintahan di *Northern Ireland Assembly* (NIA) serta menonaktifkan senjata militer, demiliterisasi keamanan dan mengakui persetujuan mayoritas untuk mengubah posisi konstitusional Irlandia Utara di dalam Inggris Raya.⁵

Republik Irlandia dan Inggris Raya, termasuk Irlandia Utara, bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1973 memiliki payung hukum ekonomi organisasi yang sama di bawah Uni Eropa. Dengan bergabungnya mereka di Uni Eropa akan diharuskan untuk mengikuti nilai-nilai keanggotaannya, salah satunya merupakan pasar internal yang menganut „*Four Freedom*“ yaitu *free movement of goods, persons, services and capital* yang dibentuk pada tahun 1957 di bawah Perjanjian Roma untuk menciptakan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) bersamaan dengan pasar internal. Pada tahun 1993 infrastruktur bea cukai dihapus karena adanya pembentukan *single market*. *Single market* merupakan adanya non-tarif untuk membentuk integrasi dengan menyelaraskan peraturan serta mengakui langkah-langkah nasional sebagai hal yang setara.⁶ Dengan adanya beberapa nilai-nilai keanggotaan tersebut maka perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia selalu terbuka semasa keanggotaannya tetapi dengan adanya Brexit dengan tidak adanya infrastruktur yang dibangun untuk menjaga kualitas perdagangan dari negara luar Uni Eropa akan menghasilkan harus adanya kesepakatan baru mengenai perbatasan ini.

B. Permasalahan Brexit terhadap Central Border

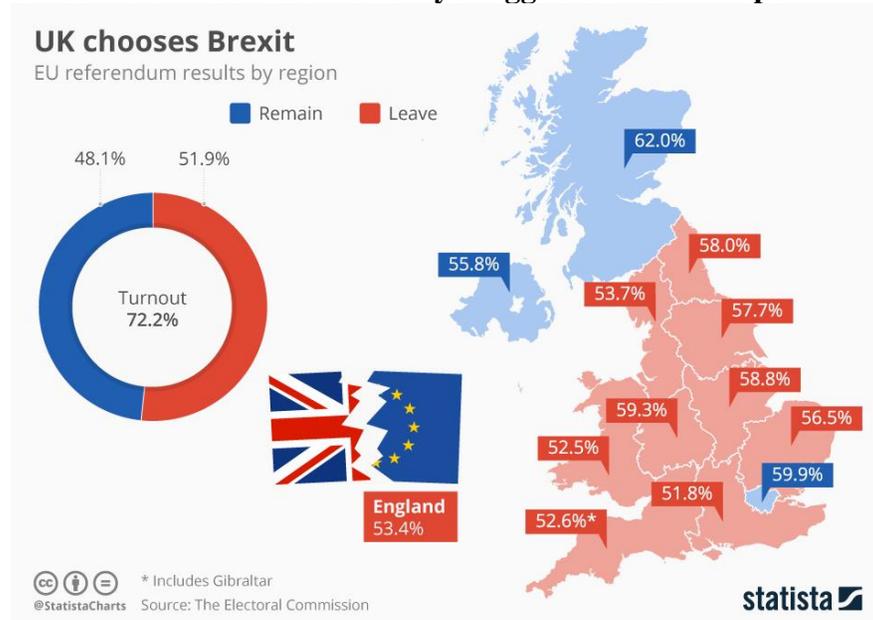
British exit atau *Brexit* yang dilakukan oleh Inggris Raya pada 23 Juni 2016 merupakan keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa.

⁵Sean Byrne, Karine Levasseur, Laura E. Reimer. 2022. “Building Peace in Northern Ireland : Hopes for the Future”, *Sage Journal*, Vol 0 (0), No1- 20. Hal 15

⁶ Dr Kathryn Wright. 2020. The EU Single Market, <https://business.senedd.wales/documents/s104692/The%20EU%20Single%20Market%20-%20a%20paper%20from%20Dr%20Kathryn%20Wright%20-%2028%20August%202020.pdf>. Diakses pada 16 Mei 2022.

Inggris Raya menganggap bahwa Uni Eropa sudah merugikan ekonomi dan stabilitas negaranya. Referendum dilakukan karena Uni Eropa dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah yang berada di dalam Uni Eropa yang berimbas pada Inggris Raya. Perdana Menteri Inggris Raya pada 2016 yang berasal dari partai konservatif merupakan David Cameron. Referendum tersebut mendapat tanggapan dari 382 distrik yang terbagi di Inggris Raya yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Hasil akhir menunjukkan bahwa wilayah bagian selain Skotlandia, Irlandia Utara dan London menginginkan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dengan perbandingan 51,89 persen memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dan 48,11 persen memilih untuk tetap menjadi anggota.⁷

Gambar 2.2. Presentase Keluarnya Inggris dari Uni Eropa



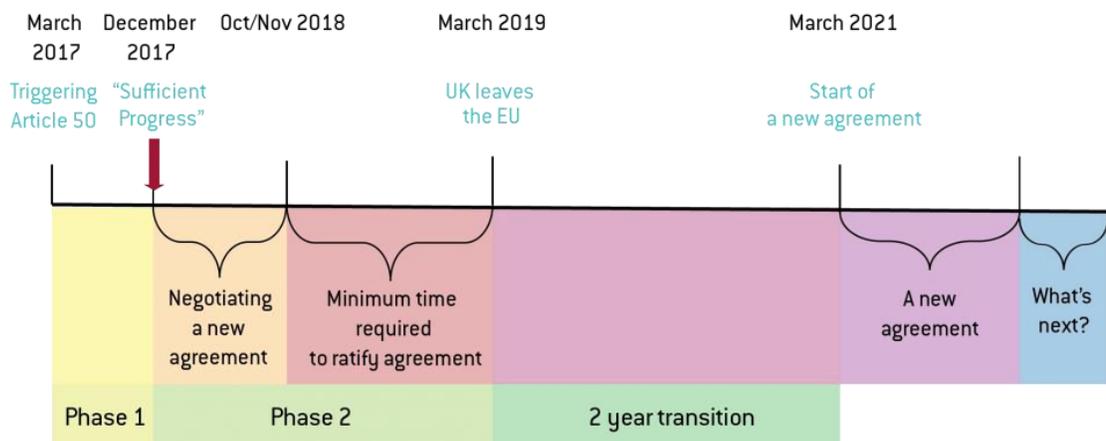
⁷ Elise Uberoi. 2016. “ Analysis of the EU referendum results 2016”. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7639/>. Diakses pada 18 Februari 2022

Sumber: Martin Armstrong.2016. UK: A Divided Nation.
<https://www.statista.com/chart/5100/uk-chooses-brexit/>. Diakses 14 Juni 2022

Dapat dilihat pada gambar 4 bahwa keluarnya Inggris Raya tentu didukung penuh oleh masyarakatnya tetapi pada kenyataannya Skotlandia dan Irlandia Utara memiliki pandangan yang berbeda. Irlandia Utara memiliki presentase kedua terbesar untuk tetap berada di Uni Eropa dikarenakan tidak inginnya ada instabilitas ekonomi. Dengan bergabungnya dengan Uni Eropa, Irlandia Utara dibukakan pintu untuk memiliki perdagangan internasional dimana bisa berdagang di seluruh Eropa dan dengan adanya *four freedom* dimana seluruh orang eropa dapat menetap di wilayah mana saja telah memberikan perspektif baru dalam banyak sektor. Maka dari itu pentingnya Inggris Raya untuk tetap meneruskan keanggotannya bagi Irlandia Utara agar tetap memiliki akses keanggotaan UE.

Gambar 2.3. Timeline Negosiasi Hubungan Baru antara Inggris Raya dan Uni Eropa

Possible time path to a new EU-UK relationship



Sumber: Maria Demetriz, Andre Sapir. 2017. *Brexit Phase two (and beyond): the future of the EU-UK relationship*. <https://www.bruegel.org/2017/12/brexit-phase-two-and-beyond-the-future-of-the-eu-uk-relationship/>. Diakses pada 22 Maret 2022.

Proses negosiasi pada 2017 dipimpin oleh Perdana Menteri Theresa May, menggantikan David Cameron, dengan menggunakan slogan “*Brexit means Brexit*” dimana pernyataan tersebut mengacu tidak akan kembalinya Inggris Raya kepada Uni Eropa. Pada proses negosiasi *Brexit* antara Inggris Raya dan Uni Eropa negosiator berharap akan adanya kesepakatan akhir dan relasi yang paralel, maka negosiasi antara Inggris Raya dan Uni Eropa dibagi menjadi tiga fase (lihat pada gambar 5). Fase pertama mencakup isu-isu penyelesaian anggaran, status warga negara Inggris Raya di Uni Eropa dan masalah lintas batas terutama perbatasan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Lalu fase kedua membahas mengenai transisi dan fase ketiga akan membahas hubungan baru antara Inggris Raya dan Uni Eropa, yang terutama akan berfokus pada perdagangan dan aspek keamanan yang akan disepakati. Theresa May (Perdana Menteri Inggris Raya) serta Taoiseach Enda Kenny (Perdana Menteri Republik Irlandia) berharap dengan adanya masalah lintas batas antara Inggris Raya dan Republik Irlandia tidak akan mengedepankan *Hard Border* (adanya petugas bea cukai dan perbatasan fisik) dan tetap menjaga *Good Friday Agreement*.

Pemungutan suara referendum pada Juni 2016 menimbulkan kekhawatiran khususnya tentang Irlandia Utara. Dengan presentase 55,8% untuk tetap berada di Uni Eropa, Irlandia Utara sangat ingin menghindari untuk adanya perbatasan ‘keras’.⁸ Prospek perbatasan

⁸ BBC.2016.”EU Referendum”. https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results. Diakses pada 15 Juli 2022

'keras' merupakan menjadi kekhawatiran karena berpotensi mengganggu keseimbangan antara status kawasan tersebut sebagai bagian dari Inggris Raya dan hubungannya yang erat dengan Irlandia. Selain itu, referendum ini berpotensi mengganggu proses perdamaian dan kemajuan yang telah dicapai sejak *Good Friday Agreement* tahun 1998. Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang sudah menjadi salah satu agenda dalam pembahasan *Brexit* sangat diharapkan dengan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa tetap ada stabilitas perbatasan, khususnya Irlandia Utara dan Republik Irlandia karena berbatasan langsung, dengan adanya kesepakatan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama salah satunya merupakan penjagaan *Good Friday Agreement* 1998.

a. **Permasalahan *Central Border* dalam *Brexit* melalui Sudut Pandang Inggris Raya serta Arti Pentingnya**

Salah satu tantangan paling kompleks untuk Inggris Raya merupakan bagaimana negara sepersemakmuran tersebut dapat mendistribusikan kebijakan secara adil terutama untuk Irlandia Utara karena Irlandia Utara hanya satu-satunya perbatasan darat langsung dengan Uni Eropa. Perbatasan tersebut menjadi tantangan bagi Inggris Raya untuk mempertahankan keadaan atau relasi spesial dengan Republik Irlandia. Permasalahan yang akan dihadapi oleh Inggris Raya adalah bagaimana membentuk kesepakatan dimana Irlandia Utara dan Republik Irlandia tetap memiliki keadaan unik serta relasi spesial tanpa mendisintegrasi pasar internal Inggris Raya serta tetap menjaga *single market* Uni Eropa. Perbatasan yang sudah terbuka sebelum masuknya kedua negara tersebut kedalam Uni Eropa harus tetap terbuka setelah keluar dari Uni Eropa. Sebelum adanya *Brexit* perbatasan ini tidak memiliki infrastruktur perbatasan maupun administratif yang

menghambat perjalanan dari satu perbatasan ke perbatasan lain tetapi dengan adanya *Brexit* akan mempersulit perjalanan impor maupun ekspor karena Uni Eropa sudah memiliki standarisasi barang yang keluar dan masuk kedalam zona ekonominya. Perbatasan ini sudah termasuk kedalam agenda pembahasan *Withdrawal Agreement Brexit* karena masalah perbatasan tersebut menyangkut ekonomi, proses perdamaian, politik, dan sosial bagi masyarakat sekitar dan juga negara terkait.

Penjagaan *Common Travel Area* (CTA) dan GFA merupakan salah satu fokus penting Inggris Raya dalam menjaga perbatasan agar tetap adanya stabilitas. CTA yang merupakan kesepakatan antara Republik Irlandia dan Inggris Raya dapat menunjang pergerakan bebas serta hak istimewa meliputi hak untuk bekerja, belajar sampai pada tunjangan kesejahteraan sosial, hal ini juga berakhir pada adanya ikatan spesial antara kedua negara tersebut.⁹ CTA harus tetap di jaga karena peraturan tersebut sudah menjadi keseharian masyarakat dan akan mengganggu perekonomian serta stabilitas jika tidak topang pada *Withdrawal Agreement*. Pentingnya untuk memastikan bahwa tidak akan kembali perbatasan ‘keras’ akibat dari negosiasi untuk pergerakan barang antara Inggris Raya dan Uni Eropa, penjagaan GFA juga merupakan indikator penting untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi Inggris Raya dan Republik Irlandia. Perdagangan Internal, antara Inggris dan Irlandia Utara, sangat penting untuk Irlandia Utara karena Inggris akan tetap menjadi pasar paling signifikan bagi Irlandia Utara. Selain itu, Inggris Raya tetap mempertahankan tidak adanya disintegrasi antara Inggris dan Irlandia

⁹ Roderick Crawford.2021." *The Northern Ireland Protocol: The Origins of the Current Crisis*". <https://policyexchange.org.uk/publication/the-northern-ireland-protocol/> . London: Policy Exchange.

Utara. Maka Inggris Raya harus tetap memiliki kebijakan yang mengakomodir CTA, GFA, kerangka Kerjasama Utara-Selatan dan Barat-Timur, hak kewarganegaraan, dan ekonomi Irlandia Utara.

b. **Permasalahan Central Border dalam Brexit melalui Sudut Pandang Uni Eropa serta Arti Pentingnya**

Uni Eropa merupakan organisasi ekonomi regional Eropa sangat mengharapkan tidak adanya gangguan ekonomi setelah keluarnya Inggris Raya dari keanggotaannya. Dengan pilihan Inggris Raya meninggalkan Uni Eropa akan menciptakan ketidakpastian signifikan yang berpotensi menyebabkan gangguan, tidak hanya di Inggris Raya tetapi pada tingkat yang lebih rendah, di Negara anggota lainnya. Kehidupan setiap warga negara yang sudah bergantung atas hak-hak dasar kemungkinan akan hilang jika tidak mendapatkan solusi yang tepat. Terlebih dengan pada sektor bisnis dan pemangku kepentingan lainnya akan kehilangan prediktabilitas dan kepastian yang datang dengan hukum Uni Eropa. Penting bagi Uni Eropa untuk menjaga integritasi *single market* serta *custom union* untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi di wilayah anggotanya.

Single market merupakan salah satu tujuan dari Uni Eropa untuk memungkinkan warga negara Uni Eropa bisa belajar, tinggal, bekerja, dan pensiun di negara Uni Eropa manapun dan menikmati produk dari seluruh Eropa. Untuk melakukan ini, *free movement of goods, services, capital and persons*, dipastikan dalam *single European Union internal market*. Dengan menghilangkan hambatan teknis, hukum, dan birokrasi, Uni Eropa juga mengizinkan warganya untuk berdagang dan berbisnis

secara bebas.¹⁰ Kebebasan pergerakan barang, jasa, modal, dan orang sangat memudahkan masyarakat anggota untuk melakukan kehidupan sehari-hari serta hal itu sudah menunjang keseharian masyarakat Uni Eropa, keluarnya Inggris Raya akan menyebabkan Inggris Raya termasuk dalam perbatasan eksternal, dalam sudut pandang Uni Eropa, karena Inggris sudah tidak memiliki hukum yang mengikat dengan Uni Eropa. Salah satu perbatasan eksternal bersinggungan langsung dengan satu-satunya negara UE, Republik Irlandia, merupakan negara bagian Inggris Raya yaitu Irlandia Utara.

Selain *single market* Uni Eropa memiliki skema perdagangan juga yaitu *custom union*. *Custom union* adalah aliansi yang dibentuk oleh anggota Uni Eropa yang akan mencakup pergerakan barang bebas tarif di dalam wilayah dimana pada impor dari luar Uni Eropa dan tidak ada bea cukai yang dikenakan di perbatasan antara negara-negara Uni Eropa. Berlangsungnya Uni Eropa *custom union* sangat penting dalam berlangsungnya *single market*. *Custom union* dinilai penting karena pada praktiknya bea cukai di semua negara Uni Eropa bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mengelola operasinya. Pentingnya hubungan perdagangan bebas tarif dan bebas kuota antara Irlandia Utara saat ini dengan Republik Irlandia terlihat jelas karena Republik Irlandia 34% dari ekspor barang dan jasanya masuk ke Uni Eropa yang hampir setengahnya ke Inggris dan adanya ketergantungan tinggi pada pembelian Inggris di negara Uni Eropa mana pun.

¹⁰Carl Emerson, Paul Johnson, Ian Mitchell. 2016. "The EU Single Market: The Value of Membership versus Access to the UK". <https://ifs.org.uk/uploads/publications/comms/R119%20-%20The%20EU%20Single%20market%20-%20Final.pdf>. London: Institute of Fiscal Studies. Hal 10

Pada 29 Maret 2017, Theresa May telah mengeluarkan pasal 50 ayat 2 kesepakatan Lisbon/ *Treaty on European Union* (TEU) sebagai dasar daripada keadilan dengan keluarnya Inggris Raya. Uni Eropa memastikan bahwa negosiasi yang berlangsung dengan dasar dari pasal 50 TEU akan transparan dan tetap sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati serta hak individu tidak akan diselesaikan secara terpisah. Dalam *Brexit*, Inggris Raya keluar dari kedua skema perdagangan tersebut yang menyebabkan adanya disintegrasi *single market* yang akan berimplikasi juga pada berjalannya *custom union* karena akan ada ketentuan baru di dalam wilayah perdagangan tersebut. Maka bagi Uni Eropa penting adanya kesepakatan baru untuk menjaga wilayah perdagangannya dan tetap membawa manfaat yang maksimal bagi negara anggotanya.

C. Tuntutan *Democratic Unionist Party* (DUP) terhadap Perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia

Democratic Unionist Party (DUP) adalah partai Unionis di Irlandia Utara yang terbentuk saat *The Trouble* oleh Ian Paisley. DUP merupakan partai terbesar kedua di *Northern Ireland Assembly* (NIA) dan merupakan partai terbesar kelima di *House of Commons of the United Kingdom*. Saat ini pemimpin partai tersebut merupakan Arlene Foster. Pendukung DUP merupakan unionis dimana mayoritas beragama protestan dan sangat loyal terhadap mahkota Inggris serta yakin bahwa persatuan politik Irlandia Utara dan Inggris Raya harus selalu dipertahankan sepenuhnya. DUP merupakan partai yang berada di sayap kanan dan merupakan konservatif sosialis.

House of Commons atau parlemen Inggris Raya memiliki 650 kursi, jika suatu partai melampaui 325 kursi dan memiliki "mayoritas" mereka dianggap dapat memenangkan suara untuk semua hal yang ingin mereka

lakukan. Pada 2017 DUP berhasil memenangkan 10 kursi parlemen di Westminster dibawah naungan partai Konservatif, partai terbesar di Inggris Raya. Dengan menempatkan 10 kursi di Westminster, DUP dapat menempatkan posisi yang kuat untuk negosiasi yang di Irlandia Utara yang hanya 3% dari penduduk di Inggris Raya.¹¹ Kekuasaan DUP di pemerintahan baru memberikan kesempatan penting untuk membentuk Brexit dan mengedepankan kepentingan terbaik untuk Irlandia Utara. DUP dianggap memiliki peran penting karena DUP merupakan salah satu partai dari Irlandia Utara yang memiliki kursi parlemen terbanyak dan bersatu dengan partai konservatif.

Dalam kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa, DUP sangat mendukung *Brexit* yang sangat berbeda pandangan dengan Irlandia Utara. Dengan dukungan *Brexit* ini tentu DUP tetap tidak menginginkan adanya disintegritas Irlandia Utara dan Inggris Raya dalam pengambilan keputusan dengan UE. DUP berulang kali menentang dan mengatakan pada partai konservatif bahwa tidak menginginkan adanya perbatasan keras di pulau Irlandia dan penerapan aturan bea cukai di pelabuhan dan bandara Irlandia, yang akan menciptakan perbatasan *de facto* di Laut Irlandia. Dalam menyampaikan argumennya tentu saja DUP selalu mengedepankan para pendukung partainya yaitu unionis DUP menginginkan pada *withdrawal agreement* tetap tercapainya perbatasan yang stabil dengan Republik Irlandia untuk mempertahankan kemudahan perdagangan dengan Irlandia dan menginginkan perjanjian perdagangan bebas serta bea cukai yang komprehensif dengan Uni Eropa.¹²

¹¹ Henry Donald. 2017. "Northern Ireland : DUP on course for gains that could help prop up Tories". <https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/09/northern-ireland-dup-on-course-for-gains-that-could-help-prop-up-tories>. Diakses pada 7 July 2022

¹² Tara John. 2017. British Election: What to Know about Democratic Unionist Party. <https://time.com/4812448/uk-election-who-are-the-democratic-unionist-party/> . Diakses pada 10 July

D. Upaya Boris Johnson terkait Central Border melalui Northern Ireland Protocol

Boris Johnson merupakan perdana menteri baru yang menggantikan Theresa May pada tahun 2019. Sebelumnya Boris Johnson merupakan Menteri luar negeri Inggris Raya pada masa pemerintahana Theresa May yang sama berada di partai Konservatif. Boris Johnson sudah sangat di favoritkan saat pengunduran diri Theresa May hal ini didorong oleh sosok Boris Johnson yang dianggap sebagai politikus yang kontroversial dengan julukan "*Britain's Trump*".¹³ Pada kampanye menjadi ketua partai Konservatif dan Perdana Meteri, Boris Johnson menjanjikan *Brexit* akan terjadi pada 31 Oktober 2019 dengan slogan "*do*" or "*die*".

Boris Johnson menetapkan adanya kebijakan revisi pada Oktober 2019 setelah menjadi Perdana Menteri pada Juni 2019. Kebijakan yang di revisi oleh Boris Johnson merupakan kebijakan yang akan ditempatkan pada perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia diubah dari *Backstop* (dibuat oleh Theresa May) menjadi *Northern Ireland Protocol*. Kebijakan tersebut direvisi karena *Backstop* memiliki banyak perdebatan pada pengambilan peraturan yang akan ditetapkan untuk *withdrawal agreement*. Pada pembuatan *Backstop* ingin mengakomodir jika persyaratan hubungan Inggris-Uni Eropa yang akan dinegosiasikan selama periode transisi gagal memenuhi komitmen Inggris Raya dan Uni Eropa bersama untuk menjaga keadaan unik di pulau Irlandia, mempertahankan kelanjutan kerjasama Utara-Selatan, menghindari perbatasan keras dan melindungi *Good Friday Agreement*, maka kebijakan tersebut merupakan sebuah jaminan.¹⁴ Inggris Raya dan UE tidak bermaksud *Backstop* akan dipergunakan selamanya, tetapi memastikan

¹⁴ David Phinnemore. 2019. "Brexit and Backstop: everything you need to know report". <https://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2019/02/Brexit-and-the-Backstop-everything-you-need-to-know-1.pdf>. London: The UK in a changing Europe. Hal 4

bahwa adanya komitmen sementara dan akan diganti dengan aturan alternatif lainnya. Ada 3 alasan mengapa *Backstop* diperlukan:

1. Menjadi jaminan karena sejak negosiasi berlangsung sudah ditekankan bahwa ketentuan *Backstop* dimaksudkan untuk diganti dengan 'pengaturan alternatif' dan digantikan oleh kesepakatan yang lain.
2. Adanya tiga landasan besar yaitu penghindaran perbatasan keras, perlindungan *Good Friday Agreement* di semua bagian perbatasan dan memastikan kerja sama Utara-Selatan yang berkelanjutan.
3. Mengingat volalitas kehidupan politik dalam pelaksanaan negosiasi dan realitas konstitusi Inggris menegaskan bahwa jaminan seperti ini diperlukan karena mengingat hubungan historis dan ruang lingkup kesalahpahaman timbal balik, pemerintah Republik Irlandia tidak bisa memastikan bahwa akan adanya stabilitas ketika solusi tersebut muncul.¹⁵

Maka dari itu *Backstop* tetap diperlukan untuk dinegosiasikan untuk mendapatkan jaminan agar Inggris Raya tidak keluar secara unilateral. Dalam negosiasi menggunakan *Backstop* banyak sekali alternatif yang dibuat seperti adanya adopsi teknologi dalam perbatasan dan *Maltahouse plan*, dimana *Maltahouse plan* akan mengadopsi perdagangan bebas atau *free trade agreement* namun hal ini tidak bisa diadopsi karena akan mempersulit dalam negosiasi *withdrawal agreement*.

Dalam praktiknya *Backstop* mengadopsi kesepakatan bahwa Irlandia Utara akan tetap berada di *Single Market* dan Inggris Raya akan tetap berada di dalam *Common Custom Territory* yang sama dengan Uni Eropa, dimana hal ini sangat memicu disintegrasi Inggris Raya dan terikat dengan Uni Eropa. *Backstop* yang diperundingkan akan masuk kepada *withdrawal*

¹⁵ Ibid hal 14

agreement melalui perdebatan yang cukup sulit di dalam internal parlemen Inggris Raya dimana menyebabkan kegagalan *Backstop* sebanyak 3 kali untuk dimasukkan kedalam *Withdrawal Agreement*. Mekanisme tersebut akan membuat Inggris Raya tetap berada di *Custom Union* Uni Eropa dimana “kecuali dan sampai” pengaturan alternatif ditemukan tetapi banyak dari anggota parlemen Inggris Raya yang *pro-Brexit* berpendapat bahwa hal ini membuat Inggris Raya menjadi negara ketiga yang tidak dapat melakukan kesepakatan perdagangannya sendiri di seluruh dunia tanpa tidak diawasi oleh UE. Pada akhirnya Theresa May mengundurkan diri pada 7 Juni 2019 dan di gantikan oleh Boris Johnson.

Setelah Boris Johnson terpilih menjadi Perdana Menteri pada 24 Juni 2019, pada 24 Agustus 2019 mengirimkan surat kepada Donald Tusk. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa *Backstop* yang akan disertakan di dalam Protokol Irlandia Utara dalam *Withdrawal Agreement* tidak dapat diterima oleh pemerintah Inggris Raya dan hambatan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh *House of Commons*. Dalam surat tersebut tertera bahwa:

1. Dengan dimasukkannya *Backstop* kepada *Withdrawal Agreement* tidak demokratis dan konsisten terhadap kedaulatan Inggris dimana memiliki potensi untuk mempertahankan Inggris Raya di serikat pabean UE tanpa batas waktu tanpa berarti keluar secara sepihak.
2. Adanya ketidak konsistenan dalam perspektif hubungan jangka panjang antara Inggris Raya dan Uni Eropa dimana Inggris Raya meninggalkan serikat pabean (*Custom Union*) UE dan pasar tunggal (*Single Market*) dimana memiliki kebebasan untuk memilih masa depannya sendiri

3. Memiliki resiko merusak stabilitas yang sudah dijaga dalam *Good Friday Agreement* antara komunitas-komunitas di Irlandia Utara yang tidak memiliki kontrol demokratis atas penghalang tersebut.¹⁶

Maka langkah berikutnya yang akan diambil oleh Boris Johnson adalah ingin menggantikan *Backstop* dengan solusi yang baru untuk menghindari perbatasan di pulau Irlandia. Pada Januari 2019, UE berkomitmen untuk mencari pengaturan alternatif dan menerapkannya sebelum akhir transisi, sehingga hambatan tidak diperlukan. Tanggapan Uni Eropa terhadap surat tersebut tetap konsisten berada dikedudukannya bahwa *Backstop* merupakan jaminan yang dimaksudkan untuk menghindari perbatasan yang keras di pulau Irlandia kecuali dan sampai solusi alternatif ditemukan. Pada awal September 2019 dimana Perdana Menteri Inggris menunjukkan adanya kemajuan yang telah di buat, pihak UE tetap bersikeras bahwa masih belum ada 'proposal konkret' atau 'alternatif yang kredibel' dari pemerintah Inggris mengenai hambatan tersebut.

Boris Johnson memiliki beberapa usulan dalam menggantikan *Backstop* dimana akan mencakup:

1. Irlandia Utara akan tetap berada di serikat pabean Inggris oleh karena itu, perbatasan antara Irlandia Utara dan Irlandia akan menjadi perbatasan pabean.
2. PPN dan cukai, yang masing-masing akan tunduk pada undang-undang UE dan Inggris, tidak akan dipungut di perbatasan tetapi menurut pengaturan yang akan ditentukan dalam Komite Bersama yang mengawasi pelaksanaan perjanjian penarikan.

¹⁶ Reuters. 2019. UK PM Johnson writes to Donald Tusk to propose Brexit deal changes <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-johnson-tusk-text-idUSKCN1V91VC>. Diakses pada Agustus 2022

3. Irlandia Utara akan menyelaraskan dengan aturan UE tentang semua barang, termasuk pangan pertanian, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pemeriksaan peraturan untuk perdagangan barang antara Irlandia Utara dan Irlandia.
4. Pengaturan 'zona pengaturan semua pulau' ini akan tunduk pada persetujuan lembaga-lembaga Irlandia Utara, sebelum mulai berlaku dan setiap empat tahun sesudahnya. Pemerintahan Inggris Raya akan tetap berupaya dalam mencari hubungan perdagangan dan ekonomi masa depan yang lebih longgar dengan UE berdasarkan perjanjian perdagangan bebas sederhana, ketentuan tingkat permainan yang disepakati dalam protokol tidak lagi diperlukan.
5. UE dan Inggris harus berkomitmen dalam protokol untuk tidak pernah memaksakan perbatasan yang keras di pulau Irlandia dan untuk menghindari pemeriksaan bea cukai, pemeriksaan peraturan, atau infrastruktur fisik terkait di perbatasan.

Akhirnya pada 2 Oktober 2019, pemerintah Inggris menerbitkan proposal untuk Protokol yang diamandemen tentang Irlandia/Irlandia Utara yang disebut *Northern Ireland Protocol*.

BAB III
FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN *NORTHERN IRELAND PROTOCOL*

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai faktor pengambilan kebijakan *Northern Ireland Protocol*. Dalam pembuktian faktor internal dan eksternal akan memiliki beberapa fokus, pada pembuktian faktor internal akan mencakup pengaruh domestik, letak geografis, dan keunikan histori sedangkan pada pembuktian faktor eksternal akan mencakup bagaimana adanya dorongan dari UE. Namun, sebelum mengenali faktor pendorong diterbitkannya maka terlebih dahulu mengetahui apa kebijakan *Northern Ireland Protocol* tersebut.

A. *Northern Ireland Protocol*

Northern Ireland Protocol merupakan rancangan undang-undang yang memiliki 26 klausul yang mana merupakan integral dari *withdrawal agreement*. Objektif pada RUU ini merupakan untuk menjaga *Good Friday Agreement*, menghindari perbatasan yang keras di pulau Irlandia, melindungi tempat Irlandia Utara di Inggris Raya dan pasar internalnya, dan melindungi Pasar Tunggal UE di dalam *withdrawal agreement* keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.¹ RUU ini bertujuan untuk memberikan kekuatan pada para Menteri dalam membuat perubahan pada pengoperasian protokol Irlandia Utara dalam hukum domestik yang akan melindungi *Good Friday Agreement* dan juga menjaga perdamaian dan stabilitas di Irlandia Utara. Pada dasarnya ketentuan yang akan diambil untuk perbatasan pulau Irlandia akan tetap mempertahankan keadaan unik dimana diperkuat dengan adanya *Northern Ireland Protocol*. Hal-

¹ Foreign, Commonwealth and Development Office. 2022. 'Northern Ireland Protocol Bill: Explanatory Notes'. <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0012/en/220012en.pdf>. London: Foreign, Commonwealth and Development Office.hal 4

hal yang akan dicakup pada *Northern Ireland Protocol* terkait pergerakan barang, regulasi barang di Irlandia Utara yang diperlukan untuk memungkinkan barang di Irlandia Utara memenuhi aturan Inggris Raya atau Uni Eropa berdasarkan pilihan produsen; pengendalian subsidi; dan pengaturan tata kelola di bawah Protokol Irlandia Utara.² Ketentuan RUU akan menciptakan keadaan unik dengan menyertakan kuasa yang didelegasikan untuk membuat ketentuan baru yang sesuai hukum domestik dan juga diberikan kepada PPN dan cukai.

Sebelumnya pada proposal *Backstop*, dimana Irlandia Utara akan tetap masuk kepada *single market* UE, memicu adanya disintergrasi pasar internal Inggris Raya serta tidak memenuhi tuntutan Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa tetap ingin mempertahankan tidak adanya pergeseran peraturan di kepulauan Irlandia. Dengan cantumkannya *Backstop* pada *withdrawal agreement*, tanpa batas akhir waktu dimana sampai adanya kebijakan alternatif, akan memicu ketidakstabilan diperbatasan tersebut walaupun mendapatkan solusi tidak adanya perbatasan keras antara Inggris Raya dan Uni Eropa. Dengan tidak setujunya parlemen Inggris Raya mengenai hal tersebut maka lahirnya *Northern Ireland Protocol* dibawah kepemimpinan Boris Johnson.³

Di bawah protokol ini, Irlandia utara secara resmi berada di luar *single market* UE, tetapi aturan pergerakan barang bebas UE dan aturan Bea Cukai UE masih berlaku untuk memastikan tidak adanya pemeriksaan pabean di kepulauan tersebut. Barang yang pindah dari Irlandia Utara ke Inggris tidak memiliki batasan tetapi hal ini tidak dapat di terapkan pada Inggris maka sebagai ganti

² Foreign, Commonwealth, & Development Office. 2022. "Northern Ireland Protocol the UK's Solutions". <https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-protocol-the-uks-solution/northern-ireland-protocol-the-uks-solution>. Diakses pada September 2022

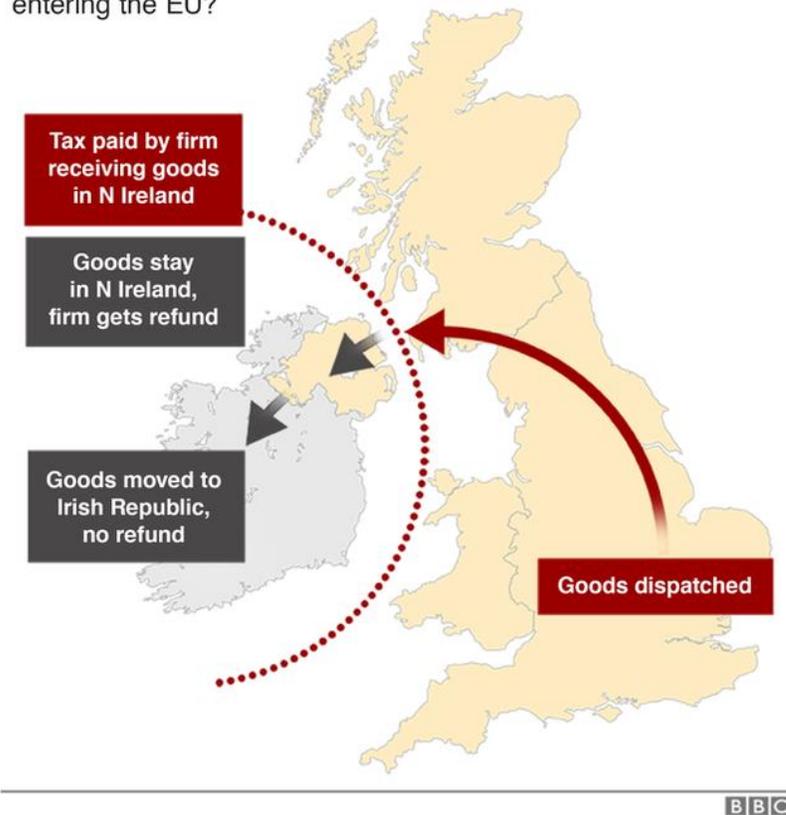
³Natasha Turak. 2017. "The Irish border and Brexit: Here's what you need to know". <https://www.cnbc.com/2017/12/06/irish-border-and-brexit-heres-what-you-need-to-know.html>. Diakses pada Agustus 2022.

perbatasan darat Irlandia/Irlandia Utara, protokol tersebut telah menciptakan perbatasan pabean *de facto* di Laut Irlandia, yang memisahkan Irlandia Utara dari Inggris Raya.

Gambar 3.1. Gambaran Perubahan Kesepakatan dari *Backstop* menjadi *Northern Ireland Protocol*

How customs might work

What might happen when a firm in Northern Ireland orders goods from the rest of the UK deemed “at risk” of then entering the EU?



Sumber: BBC.2019. Brexit:What is Boris Johnson’s new deal with the EU.
<https://www.bbc.com/news/uk-50083026>. Diakses pada 20 Juli 2022

Pada gambar 6 menjelaskan bahwa secara hukum akan tetap ada perbatasan pabean antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, tetapi dalam

praktiknya tidak ada pemeriksaan di perbatasan tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan di perbatasan pabean antara Inggris Raya dan pulau Irlandia dengan pemeriksaan di titik masuk ke Irlandia Utara. Pajak yang harus dibayarkan untuk barang yang dipindahkan dari Inggris Raya ke Irlandia Utara jika produk yang di pindahkan dianggap “beresiko” untuk kemudia diangkut ke Republik Irlandia dimana adanya sebuah komite bersama yang terdiri dari perwakilan Inggris Raya dan Uni Eropa yang akan memutuskan bahwa barang apa yang di anggap “beresiko”. Jika pajak barang “beresiko” sudah dibayar dimana akhirnya tidak dikirim dari Irlandia Utara ke Republik Irlandia, maka Inggris Raya akan bertanggung jawab apakah pajak tersebut akan dikembalikan atau tidak. Ketentuan ini yang menggantikan ketentuan bahwa Irlandia Utara akan tetap masuk ke *single market*, pada *Backstop*.

Dalam mekanismenya *Northern Ireland Protocol* akan berlaku pada 31 Desember 2020 dimana setelah 4 tahun Inggris Raya bisa menyediakan kesempatan bagi Irlandia Utara apakah *Northern Ireland Protocol* akan tetap di terapkan atau tidak. Pemungutan suara pertama akan dilakukan pada Desember 2024. Pada protokol ini ada beberapa aspek dimana Irlandia Utara akan tetap mengikuti regulasi UE untuk menghindari perbatasan keras seperti barang industri dan makanan hasil pertanian. PPN UE dan aturan bea cukai akan tetap di adopsi, meskipun akan tetap pada wilayah pabean Inggris Raya. Hal ini menyebabkan adanya cek dokumen yang diperlukan untuk barang- barang yang tidak dapat disertifikasi sebagai barang yang tinggal di Irlandia Utara. Di bawah *withdrawal agreement*, Institusi Irlandia Utara akan diminta secara berkala untuk menyetujui pengaturan perdagangan dimana ini akan memberikan Lembaga kesempatan apakah akan tetap menerapkannya atau tidak. Pasal-pasal lain dari protokol yang mencakup jaminan atas hak dan kesetaraan, komitmen terhadap area perjalanan bersama dan untuk mempertahankan kerjasama utara-selatan akan tetap berlaku terlepas dari suara persetujuan apa pun.

B. Faktor Pendorong Penerbitan *Northern Ireland Protocol*

1. Faktor Internal

Dalam faktor internal pendorong diterbitkannya *Northern Ireland Protocol*, akan mendalami 3 aspek yang dibahas yaitu domestik, letak geografis, dan keunikan histori. Dengan mengenali dan mengetahui permasalahan yang terjadi pada faktor internal maka pembaca bisa memahami mengapa faktor itu bisa mendorong diterbitkannya kebijakan *Northern Ireland Protocol*.

a. Domestik

Partai yang memimpin Inggris Raya didominasi oleh partai Konservatif saat keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. Selama pemerintahan berjalan, pada saat negosiasi *Brexit*. adanya pergantian 2 Perdana Menteri. Pada 2017 negosiasi dipimpin oleh Theresa May dimana menghasilkan proposal *Backstop* dan pergantian pada 2019 digantikan oleh Boris Johnson dengan mengeluarkan *Northern Ireland Protocol Bill*. Kedua Perdana Menteri tersebut memiliki visi yang sama dimana akan tetap menjaga perbatasan tersebut tetap terbuka.

Partai konservatif ,pada masa kedudukan Theresa May, memiliki ikatan yang dekat dengan salah satu partai Irlandia Utara yaitu *Democratic Unionist Party* (DUP). Selain DUP, terdapat salah satu partai yang kuat yaitu *Sinn Fein* dimana para pendukungnya merupakan dari kubu republic yang lebih melekat terhadap Kepulauan Irlandia.⁴ *Sinn Fein* pada NIP mengatakan bahwa protocol tersebut memang

⁴ Sinn Fein. 2022. "History". <https://www.sinnfein.ie/history>. Diakses pada September 2022.

diperlukan setelah brexit, dimana *Sinn Fein* mengatakan bahwa NIP memberi Irlandia Utara akses ke pasar UE dan Inggris, melindungi Perjanjian Jumat Agung dan mencegah perbatasan keras di pulau Irlandia.⁵ Namun Sinn Fein pada tahun 2017 belum bisa mendapatkan kursi parlemen untuk memiliki suara seutuhnya di *House of Commons*.

Partai konservatif dan DUP memiliki sebuah kesepakatan dimana kesepakatan tersebut mencakup tentang *'confidence and supply'*.⁶ Kesepakatan yang di buat oleh kedua partai ,ditandatangani oleh Gavin Williamson untuk Konservatif dan Jeffrey Donaldson untuk DUP, akan membuat Theresa May memimpin pemerintahan Konservatif minoritas yang didukung secara legislatif oleh DUP. Selain itu, kesepakatan ini juga memiliki manfaat bagi DUP dimana DUP mendapatkan tambahan dana £1 miliar untuk Irlandia Utara, dengan uang difokuskan pada anggaran kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Hal ini juga berpengaruh pada pemilihan di *house of commons*. Pada saat pemilihan, Partai konservatif memiliki pemilih sebanyak 318 anggota parlemen dan DUP memiliki 10 pemilih anggota parlemen dimana DUP akan mendukung partai konservatif untuk bisa naik pada kursi pemerintahan.

Setelah terpilihnya Theresa May pada 2017 dengan mengeluarkan proposal *Backstop*, banyak perdebatan yang terjadi, tetapi akhirnya May dan Uni Eropa mencapai kompromi pada November 2018. Kompromi ini menyimpulkan bahwa jika dari kedua belah pihak belum menemukan cara untuk menghindari pemeriksaan fisik di perbatasan Irlandia Utara sampai periode transisi, Inggris akan tetap berada dalam pengaturan bea cukai dengan Uni Eropa. Selain itu

⁵ BBC. 2022.” The Northern Ireland Protocol: What does each side want ?”.<https://www.bbc.com/news/uk-politics-61477844>. Diakses pada September 2022.

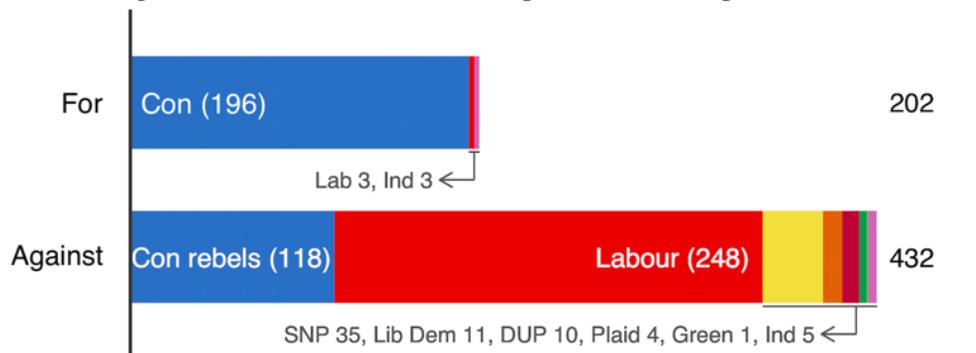
⁶ Aubrey Allegretti. 2018. “What is DUP confidence and supply deal keeping Tories in power?”. <https://news.sky.com/story/what-is-in-the-dup-confidence-and-supply-deal-keeping-tories-in-power-11558463>. Diakses pada September 2022

Irlandia Utara akan tetap lebih condong kepada Uni Eropa dalam pengaturan barang. Jika May dan UE belum menemukan cara untuk menghindari pemeriksaan fisik di perbatasan Irlandia pada akhir periode transisi, seluruh Inggris akan tetap berada dalam pengaturan bea cukai dengan UE. Irlandia Utara juga akan memiliki keselarasan yang sedikit lebih dekat dengan aturan UE dalam hal barang. Backstop berakhir ketika kedua belah pihak menyetujui pengaturan permanen yang membuat perbatasan tetap terbuka, dan Inggris tidak dapat menariknya secara sepihak.⁷

Kompromi yang telah dibuat oleh May sangat mengguncang hampir semua politik di Inggris Raya. Terlebih untuk para *Brexiters* garis keras – mereka yang menginginkan pemutusan hubungan dengan UE – melihat bahwa tidak sejalan dengan apa yang ingin di capai oleh Inggris Raya dan berpotensi menjebak Inggris dalam hubungan dekat dengan Uni Eropa tanpa batas waktu. Selain itu, hal ini juga memiliki efek pada anggota serikat pekerja di Irlandia utara, termasuk yang berada di DUP. Para unionist melihat akan adanya potensi bahwa penghalang ini akan memperlakukan Irlandia Utara secara berbeda dimana akan menciptakan jarak antara Irlandia Utara dan Inggris Raya. Dalam kenyataannya, partai Theresa May bergantung kepada DUP untuk menjaga pemerintahannya tetap berkuasa, sehingga keberatan mereka memiliki pengaruh yang besar dalam debat ini.

⁷ David Phinnemore. 2019. "Brexit and Backstop: everything you need to know report". <https://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2019/02/Brexit-and-the-Backstop-everything-you-need-to-know-1.pdf>. London: The UK in a changing Europe. Hal 5

Gambar 3.2. Persentase Penolakan Kesepakatan Theresa May
MPs rejected Theresa May's deal by 230 votes



Source: Commons Votes Services. Excludes 'tellers', the Speaker and deputies **BBC**

Sumber:BBC. 2019.” Brexit:Theresa May’s deal is voted down in historic Commons defeat”. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-46885828>. Diakses pada Juli 2022

Pada gambar 7 merupakan pemilihan untuk kesepakatan *Brexit* pada masa Theresa May yang ditolak oleh 230 suara , dilakukan pada Januari 2019, dimana hal ini merupakan kekalahan terbesar bagi pemerintahan yang sedang berkuasa dalam sejarah pemerintahan Inggris Raya. Sebanyak 432 anggota parlemen dapat memberikan suara berbanding dengan 202 yang menolak kesepakatan dalam menetapkan persyaratan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.⁸ Inggris Raya masih menginginkan adanya kesepakatan untuk pergi pada 29 Maret 2019 tetapi kekalahan tersebut membuat adanya keraguan. Pemilihan kesepakatan ini sudah berjalan sebanyak tiga kali dimana dilakukan pada Maret 2019 dengan 242 dari 391 dan pemilihan

⁸ BBC. 2019.” Brexit:Theresa May’s deal is voted down in historic Commons defeat”. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-46885828>. Diakses pada Juli 2022.

terakhir dengan 286 dari 391 suara yang menolak.⁹¹⁰ Pada sanggahan yang diberikan adalah adanya salah perhitungan dimana May menghadapi dua masalah yaitu perlawanan terus-menerus dari anggota parlemen, terutama garis keras di Partai Konservatifnya dan ketua *House of Commons*, John Bercow, yang memutuskan bahwa May tidak dapat mengembalikan kesepakatan *Brexit* untuk pemungutan suara ketiga kecuali jika itu diubah secara substansial. Theresa May mendeklarasikan pengunduran diri setelah kesepakatannya disahkan dan membiarkan perdana menteri berikutnya menegosiasikan hubungan Uni Eropa dengan Inggris Raya di masa depan, seperti yang diminta dalam deklarasi politik. Selain itu May tidak dapat meyakinkan DUP dalam mengatasi keberatannya dalam *withdrawal agreement* dimana mereka menolak adanya *Irish Backstop* bahwa dalam pandangannya adanya ancaman konstitusional karena membuat Irlandia Utara lebih dekat dengan Uni Eropa dibandingkan dengan Inggris Raya lainnya.

Setelah pengunduran diri Theresa May akhirnya digantikan oleh Boris Johnson pada Juni 2019. Setelah terpilihnya Johnson, DUP berjanji untuk mendukung pemerintahan Johnson di Westminster karena dapat mempertahankan mayoritas sedikit pekerja yang dimiliki Theresa May di *House of Commons*. Selain itu, DUP juga sangat setuju dengan tawaran Boris Johnson ke Uni Eropa dimana mencakup pembuatan zona peraturan semua pulau untuk pertanian, makanan, dan semua barang manufaktur. Maka dari perspektif yang sudah di paparkan

⁹ Jen Kirby. 2019. Theresa May's Brexit deal fails — again. <https://www.vox.com/world/2019/3/12/18259917/brexit-deal-theresa-may-parliament-vote>. Diakses pada Agustus 2022

¹⁰ Jen Kirby. 2019. British Prime Minister Theresa May's Brexit agreement fails for a third time <https://www.vox.com/world/2019/3/29/18285930/brexit-deal-defeated-parliament-theresa-may-third-time>. Diakses pada Agustus 2022

diatas, banyak sekali campur tangan DUP sebagai salah satu partai dari Irlandia Utara terhadap konservatif dimana hal ini juga menyangkut dengan suara pemilihan di *House of Commons*.

b. Letak Geografis

Salah satu faktor pendorong diterbitkannya *Northern Ireland Protocol* adalah letak geografis. Negara Irlandia Utara terletak pada kepulauan Irlandia yang berdampingan dengan Republik Irlandia. Irlandia Utara merupakan kesatuan dengan Inggris Raya dimana Irlandia Utara terletak pada kepulauan Irlandia. Hal ini dikarenakan dahulu Republik Irlandia masih merupakan kesatuan dengan Inggris Raya tetapi dengan adanya *Irish Freestate* membuat Republik Irlandia memisahkan diri dari Inggris Raya dimana Irlandia Utara tetap memilih bergabung dengan Inggris Raya. Keadaan dikawasan ini merupakan fenomena yang unik dari segi politik, ekonomi, budaya dan ideologis karena hal-hal tersebut memiliki kesinambungan yang sama. Irlandia Utara yang memilih bergabung dengan Inggris Raya memiliki hubungan yang unik terhadap Republik Irlandia dimana tidak memiliki perbatasan yang terlihat setelah adanya *Good Friday Agreement*. Hal ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat sulit pada negosiasi Inggris Raya dan Uni Eropa karena masih ingin mempertahankan keadaan unik dan tidak adanya perbatasan baru di kepulauan tersebut. Letak geografis sejatinya sangat berpengaruh karena mobilitas penduduk maupun pelaku bisnis berpengaruh di titik perbatasan antara kedua negara tersebut.

Gambar 3.3. Peta letak Inggris Raya dan Republik Irlandia



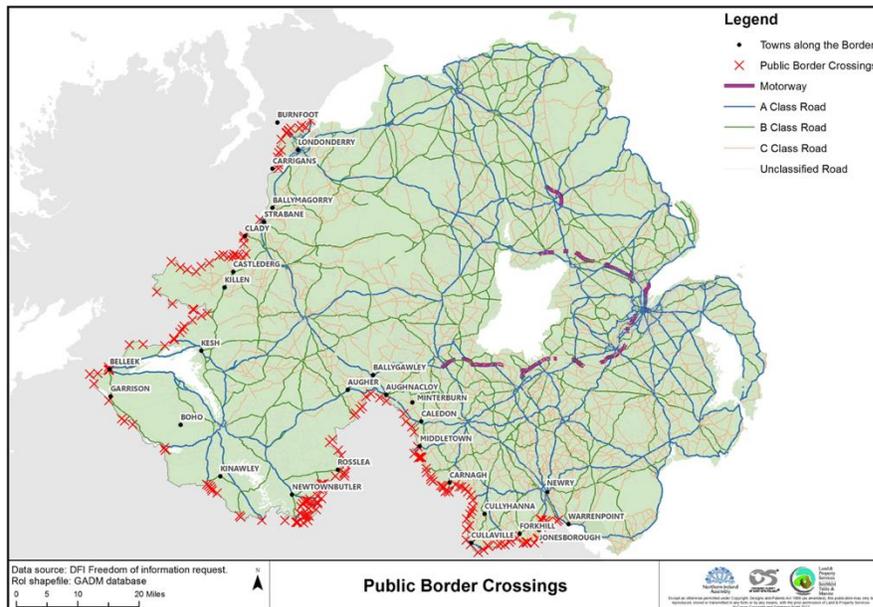
Sumber: Peter Hermes Furian. Ireland and United Kingdom Political map.
<https://www.alamy.com/stock-photo-ireland-and-united-kingdom-political-map-with-capitals-dublin-and-124641087.html>. Diakses pada 20 Juli 2022

Seperti yang bisa dilihat pada gambar 8 letak daripada negara Republik Irlandia dan Irlandia Utara berada disatu pulau dimana keberjalanan ekonomi, hukum, budaya, sosial, dan kebijakan dari kedua negara tersebut saling ketergantungan. Wilayah perbatasan kepulauan Irlandia sangat rentan terhadap dampak Brexit, mengingat warisan pinggiran, keterbelakangan, dan konflik kekerasan di masa lalu. Potensi dampak Brexit bagi masyarakat di wilayah perbatasan terbukti tidak hanya diukur dari segi ekonomi saja karena perbatasan tersebut memiliki makna emosional dan simbolis.¹¹ Dengan Irlandia Utara yang

¹¹Cormac Walsh. 2019. 'Brexit Geographies: Spatial Imaginaries and Relational Territorialities on the Island of Ireland'. Irish Geography. Vol 52, No. 2. Hal 138.

keluar dari Uni Eropa, bersama Inggris Raya, menyebabkan adanya hambatan yang terjadi karena masih memiliki perbatasan dengan salah satu anggota Uni Eropa.

Gambar 3.4. Titik Perbatasan pada Perbatasan Kepulauan Irlandia



Sumber: Northern Ireland Assembly Commission. 2018. Public Road Border Crossings between the Republic of Ireland & Northern Ireland. <https://brilliantmaps.com/border-crossings-ireland/>. Diakses pada Juli 20

Seperti pada gambar 9, perbatasan tersebut memiliki 195 titik lintas perbatasan umum antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Dalam perbatasan tersebut juga, dikutip dari BBC, dalam 10 menit dapat melintasi 4 perbatasan dalam satu perjalanan, dalam penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa akan adanya kesulitan dalam pergantian rutinitas perbatasan jika adanya pebatasan keras.¹²

Pada dasarnya memang memfasilitasi perdagangan bukan hal yang terpenting dalam menghindari perbatasan keras melainkan menjaga simbol keberhasilan proses perdamaian di Irlandia Utara yaitu *Good Friday Agreement*. Perjanjian tersebut membentuk mekanisme formal dan informal untuk kerjasama lintas komunitas dalam berbagai masalah, dimana mendukung 'normalisasi' hubungan antara komunitas Protestan dan Katolik di Irlandia Utara dan di seberang perbatasan.

Sama seperti pada *Backstop*, perbatasan ini tetap ingin dijaga untuk tidak memiliki potensi akan memilih kesepakatan yang akan memiliki perbatasan fisik. *Backstop* sempat memiliki konsep akan dibuatnya perbatasan berbasis teknologi tinggi untuk menggantikan adanya petugas penjaga tetapi dinilai oleh kedua belah pihak bahwa perbatasan tersebut tetap sulit untuk dioperasikan. Kelemahan pada pengaturan *Backstop* adalah dengan adanya sebagian Inggris Raya di luar pabean akan memiliki potensi menyimpang dari segi standar produk dan beberapa pemeriksaan serta kontrol dengan Uni Eropa, dimana akan diperlukan pada pergerakan barang dari negara lain. Dalam implementasinya, diinginkan untuk meminimalisir pemeriksaan dan kontrol dimana elemen *Backstop* disematkan untuk seluruh Inggris Raya: 'wilayah pabean tunggal' antara Inggris Raya dan Uni Eropa.

Pada *Northern Ireland Protocol* akan tetap menjaga agar tidak ada dibuatnya perbatasan secara fisik maupun apapun yang akan membuat Irlandia Utara terpisah dari Inggris Raya. Inggris Raya akan

¹² Peter Hamill.2017. Crossing Border 4 Times in 10 Minutes. <https://www.bbc.com/news/av/uk-northern-ireland-40104333>. Diakses pada 1 Agustus 2022

tetap mempertahankan Irlandia Utara tetap akan berada di teritori pabean bersama Inggris Raya seperti pernyataan berikut:

Article 4

Customs territory of the United Kingdom

Northern Ireland is part of the customs territory of the United Kingdom.

Accordingly, nothing in this Protocol shall prevent the United Kingdom from including Northern Ireland in the territorial scope of any agreements it may conclude with third countries, provided that those agreements do not prejudice the application of this Protocol.

In particular, nothing in this Protocol shall prevent the United Kingdom from concluding agreements with a third country that grant goods produced in Northern Ireland preferential access to that country's market on the same terms as goods produced in other parts of the United Kingdom.

Nothing in this Protocol shall prevent the United Kingdom from including Northern Ireland in the territorial scope of its Schedules of Concessions annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

(Pasal 4

Wilayah pabean Inggris Raya

Irlandia Utara adalah bagian dari wilayah pabean Britania Raya.

Dengan demikian, tidak ada satu pun dalam Protokol ini yang akan mencegah Inggris Raya untuk memasukkan Irlandia Utara dalam lingkup teritorial dari setiap perjanjian yang mungkin dibuatnya dengan negara ketiga, asalkan perjanjian tersebut tidak mengurangi penerapan Protokol ini.

Secara khusus, tidak ada dalam Protokol ini yang akan mencegah Inggris Raya dari membuat perjanjian dengan negara ketiga yang memberikan barang-barang yang diproduksi di Irlandia Utara akses preferensial ke pasar negara itu dengan persyaratan yang sama seperti barang-barang yang diproduksi di bagian lain dari Inggris.

Tidak ada dalam Protokol ini yang akan mencegah Inggris untuk memasukkan Irlandia Utara dalam lingkup teritorial Jadwal Konsesinya yang dilampirkan pada Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.)¹³

Johnson menyatakan bahwa Inggris Raya harus keluar dari *Custom Union* pada seluruh aspek untuk bisa menjalankan kesepakatan selanjutnya untuk seluruh Inggris Raya. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis menjadi salah satu pendorong diterbitkannya *Northern Ireland Protocol*.

c. Keunikan Histori

Faktor pendorong lainnya selain domestik dan letak geografis adalah keunikan histori. Keunikan histori dalam masalah perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia sangat memiliki dampak yang

¹³ United Kingdom Government. 2019. 'Revised Protocol to the Withdrawal Agreement Protocol on Ireland/Northern Ireland'. https://ec.europa.eu/info/publications/revised-protocol-ireland-and-northern-ireland-included-withdrawal-agreement_en. United Kingdom: European

signifikan karena adanya sensitifitas yang memiliki potensi mengganggu stabilitas perbatasan. Keunikan histori juga merupakan salah satu pendorong yang dicantumkan pada Artikel 1, Objective pada poin 3 yang berbunyi:

“ 3. This Protocol sets out arrangements necessary to address the unique circumstances on the island of Ireland, to maintain the necessary conditions for continued North-South cooperation, to avoid a hard border and to protect the 1998 Agreement in all its dimensions.” (“3. Protokol ini menetapkan pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan unik di pulau Irlandia, untuk mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk melanjutkan kerjasama Utara-Selatan, untuk menghindari perbatasan yang keras dan untuk melindungi Perjanjian 1998 dalam semua dimensinya.”)¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa adanya tantangan-tantangan yang terjadi jika pada perjanjian *Brexit* tidak menjaga keunikan histori ini.

Pada pembuatan kebijakan untuk Irlandia Utara ada beberapa hal yang harus bisa dijaga atau dipenuhi karena dampak dari *brexit*. Pengakuan adanya relasi khusus merupakan hal yang utama dimana para pihak setuju bahwa keberadaan *Good Friday Agreement* harus memiliki solusi spesifik karena kerja bersama dalam proses perdamaian tidak terpengaruh kesepakatan yang akan dibentuk. Dengan penjagaan *Good Friday Agreement* secara tidak langsung akan menekan potensi terbentuknya perbatasan fisik dan tetap menjaga *Common Travel Area*. Selain itu, harus adanya penjagaan terhadap dampak stabilitas perbatasan yang akan terganggu. *Good Friday Agreement* memiliki peran besar dalam menjalankan institusional serta kesepakatan tersebut

¹⁴ Ibid hal 4

memiliki premis bahwa kedaulatan dapat dibagi dan kekuatan nasional ditingkatkan melalui kerja sama transnasional. Dampak tersebut menjadi perhatian karena adanya ketidakpastian mengenai status perbatasan di masa depan dan kurangnya lembaga pembagian kekuasaan yang berfungsi. Selain itu, adanya kondisi perbatasan dan Kerjasama lintas batas yang akan terdampak oleh kebijakan baru. Dampak yang akan terjadi merupakan dengan deklarasi keluarnya Inggris Raya akan mengikut sertakan keluarnya dari *Single Market* dan *Custom Union* dimana akan adanya peningkatan pembatasan pergerakan barang. Pembatasan pergerakan barang akan terjadi terutama barang yang akan diimpor ke Irlandia Utara dari luar Inggris Raya dan UE serta kebutuhan akan fasilitas pemeriksaan pabean. Karena perbatasan tersebut sudah menjadi keseharian masyarakat yang berada di pulau tersebut maka pentingnya menjaga keberlangsungan kedamaian dan juga ketentuan yang tidak mengganggu aktifitas masyarakat secara signifikan.

Tantangan yang akan dihadapi oleh semua pihak dalam penarikan keanggotaan Inggris Raya dari Uni Eropa merupakan bagaimana hubungan masa depan antara Inggris Raya dan Uni Eropa tidak memiliki dampak yang merugikan pada fungsi *Good Friday Agreement*. *Northern Ireland Protocol* sendiri bertujuan untuk menjaga *Good Friday Agreement* karena keunikan ini juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembuatan protokol untuk Irlandia Utara pada negosiasi bersama Uni Eropa. Pengakuan terhadap adanya situasi yang sangat unik pada negosiasi masa depan Inggris Raya dan UE oleh semua pihak juga mendorong adanya upaya dalam menciptakan ruang bagi tantangan yang akan dihadapi pada Brexit tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak adalah meminimalisir adanya dampak ekonomi, politik, regulasi, dan sosial dalam yang ditimbulkan oleh penarikan Inggris

Raya pada Irlandia Utara dan dalam hubungan Irlandia Utara bersama Inggris secara umum.¹⁵

Dalam kesepakatan sebelumnya ,yaitu *Backstop*, memiliki beberapa kendala dalam menjaga keunikan histori dari pulau tersebut. Dengan adanya kompromi May dengan Uni Eropa pada November 2018, bahwa jika tidak ada kesepakatan untuk menghindari perbatasan fisik sampai waktu periode transisi, Inggris akan tetap berada dalam pengaturan khusus deng Uni Eropa. Selain itu, Irlandia Utara akan tetap menelaraskan beberapa peraturan Uni Eropa khususnya pada barang. Hal ini menghasilkan kesepakatan bahwa ketika *Backstop* akan berakhir jika memiliki kesepakatan baru. Banyak dari pendukung *Brexit* dan *remain* tidak menyukai pengaturan *Backstop* dikarenakan tidak selaras dengan kampanye yang ditunjukkan untuk meninggalkan Uni Eropa sepenuhnya. Setelah terpilihnya Boris Johnson dengan slogan bahwa *Backstop* tidak demokratis maka Johnson memilih untuk menerbitkan *Northern Ireland Protocol* yang memiliki ketentuan berbeda dengan *Backstop*. *Northern Ireland Protocol* dapat disebut demokratis karena adanya keterlibatan pemilihan suara untuk pihak Irlandia Utara yang akan di lakukan 4 tahun sekali untuk mendapatkan masukan dan persetujuan akan keberlangsungan *Northern Ireland Protocol*.

Hal ini menunjukan adanya sentimen khusus terhadap pengeklusifan Irlandia Utara dalam kebijakan yang akan ditetapkan. Adanya permasalahan dari *the trouble* yang membawa trauma secara massal akan mempengaruhi bagaimana kebijakan baru tersebut akan

¹⁵ David Phinnemore, Katy Hayward. 2017. "UK Withdrawal ('Brexit') and the Good Friday Agreement". [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU\(2017\)596826_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf) . Brussel: European Parliament's Committee. Hal 12

mengakomodir perdamaian di perbatasan. Keunikan histori dalam perbatasan ini memang sangat berpengaruh, adanya ikatan spesial antara negara Irlandia Utara dan Republik Irlandia memiliki kompleksitas dalam penyelesaian perbatasan dalma keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. *Northern Ireland Protocol* sudah diusahakan mengakomodir semua kewajiban yang diresahkan, walaupun Irlandia Utara tidak memiliki suara yang banyak dalam keputusan *withdrawal agreement* dan harus bergantung dengan Inggris Raya tetapi Inggris Raya tetap menjaga negara-negara pesemakmurannya.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal ada juga dorongan eksternal dalam penerbitan *Northern Ireland Protocol* yaitu adanya dorongan dari Uni Eropa. Uni Eropa bisa tergolong sebagai bantuan dalam proses perdamaian Irlandia Utara dimana Uni Eropa bisa memberikan stabilitas dalam perbatasan tersebut atau yang bisa dibilang *equal bilateral relationship*. Uni Eropa juga sudah banyak mengeluarkan dana untuk menopang proses perdamaian dan memelihara hubungan lintas-komunitas, lintas batas. Pada dasarnya dana yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dianggap oleh para loyalis dan nasionalis sama-sama netral, dan karena itu dapat diterima. Namun dengan adanya *Brexit* hal ini mengancam pemecahan antara komunitas yang sudah terbentuk tersebut.

Ada empat bidang utama dalam keanggotaan Uni Eropa yang telah mengubah perbatasan antara Inggris Raya dan Republik Irlandia yaitu:

1. Memungkinkan adanya depolitisasi dan normalisasi kerja sama lintas batas di pulau itu dimana hal ini sangat penting untuk menopang proses perdamaian .

2. Telah memfasilitasi perdagangan melalui keanggotaan *custom union* dan *single market* dimana adanya penghapusan pos pabean dan tarif dan pengurangan besar hambatan non-tarif untuk perdagangan.
3. Memiliki sistem regulasi yang harmonis dengan memiliki standar keselamatan dan perpajakan yang lebih lanjut memfasilitasi pertumbuhan perdagangan lintas batas.
4. Kebebasan bergerak orang di *single market* menopang langkah-langkah tambahan untuk perlindungan dan kesejahteraan warga negara UE di sekitar UE.¹⁶

Keempat hal ini merupakan dampak yang diberikan oleh keanggotaan Uni Eropa dalam menopang perdamaian di dalam perbatasan Republik Irlandia dan Inggris Raya.

Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa memiliki tujuan untuk meninggalkan *single market* serta *custom union* dimana akan mempersulit akses perdagangan pada perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Dalam hal ini Uni Eropa menuntut untuk tidak adanya disintegrasi dalam *single market* maupun *custom union* karena Irlandia Utara masih bersinggungan dengan salah satu anggota Uni Eropa. Dengan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa akan menambah persyaratan administratif yang lebih besar, peningkatan pembatasan pergerakan barang, terutama yang diimpor ke Irlandia Utara dari luar Inggris dan Uni Eropa, dan kebutuhan akan fasilitas pemeriksaan pabean. Selain hambatan non-tarif untuk perdagangan jasa dan biaya pembatasan *Freedom of Movement* tenaga kerja, dan juga pengenaan kembali bea atas barang yang pergi dari Inggris Raya ke Republik

¹⁶ Ibid. hal 30

Irlandia (UE). Efek negatif yang akan terjadi dalam hubungan perdagangan dengan Republik Irlandia akan menambah beban administrasi untuk perdagangan lintas batas. Dampaknya akan ada potensi bahwa perbatasan akan lebih sulit daripada yang terjadi saat ini. Jika Inggris Raya tidak mempertahankan perdagangan bebas dengan UE (yaitu jika tidak ada perjanjian perdagangan bebas antara keduanya), maka kebutuhan akan kontrol bea cukai akan jauh lebih besar.

Inggris Raya pada posisi ini akan disebut sebagai ‘negara ketiga’ karena sudah tidak menjadi anggota dari Uni Eropa. ‘Negara ketiga’ juga menjadi salah satu pendorong harus adanya kesepakatan dalam mengakomodir perdagangan dengan Uni Eropa secara sistematis. Kutipan dari mantan Menteri Luar Negeri pada 2016, Boris Johnson, mengatakan bahwa “Inggris meninggalkan Uni Eropa, itu tidak meninggalkan Eropa”, hal ini menggambarkan bahwa Inggris Raya tidak sepenuhnya akan hilang dari Eropa dan tetap menjaga hubungan dengan Uni Eropa. Dengan menjadi ‘negara ketiga’ dari perspektif Uni Eropa, Inggris Raya tetap akan terdampak oleh perubahan aturan Uni Eropa dan tetap perlu bekerja sama dengan Uni Eropa untuk memberikan prioritas baru pada ranah domestik maupun internasional namun peran Inggris Raya akan menurun dalam pembuatan Undang-undang Uni Eropa.

Dengan mengetahui bahwa Inggris Raya sudah menjadi ‘negara ketiga’ pada keanggotaan Uni Eropa tentu Uni Eropa akan menuntut adanya kesepakatan lanjutan pada hubungan Inggris Raya dan Uni Eropa. Keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa tergabung pada *single market* dan *custom union* dimana Inggris Raya ingin keluar dari kedua manfaat keanggotaan tersebut. Keluarnya dari manfaat keanggotaan tersebut juga tidak mudah karena Irlandia Utara masih bersinggungan

dengan salah satu anggota yaitu Republik Irlandia, dimana harus memiliki kesepakatan terusan yang mengakomodir perdamaian di perbatasan yang dahulu di dukung dengan adanya *single market* dan *custom union* yang menjaga perbatasan tersebut tetap terbuka. Uni Eropa tetap menginginkan adanya intergrasi *single market* dalam kasus ini. Pada *Backstop* Inggris Raya tetap berada pada *custom union* dan Irlandia Utara akan berada pada *single market*, hal ini akan membuat Inggris Raya tetap terikat dengan Uni Eropa. Rencana Boris Johnson akan tetap menjaga perbatasan terbuka dengan mencantumkan aturan *single market* pada Irlandia Utara yang akan membuat perbatasan *de facto* di laut, maka hal ini sudah mengakomodir apa yang ingin di capai pada negosiasi.

BAB IV KESIMPULAN

Keluarnya Inggris Raya dari keanggotannya di Uni Eropa pada Juni 2016 merupakan fenomena yang sangat meramaikan dunia perpolitikan. Hal ini seringkali diasosiasikan dengan imbas dari ketidakpuasan rakyat dalam faktor ekonomi dan krisis migran. Namun dengan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa memiliki dampak yang dihasilkan dengan perbatasan antara Irlandia Utara dan salah satu anggota Uni Eropa yaitu Republik Irlandia. Maka dengan adanya Brexit diperlukan adanya kesepakatan baru yang menyangkut kesepakatan perbatasan tersebut.

Meski demikian, adanya beberapa pertimbangan yang harus ditinjau lebih lanjut untuk menempatkan kebijakan baru pada perbatasan tersebut. Sebelum pemerintahan Boris Johnson pada 2019, Theresa May sudah memulai negosiasi *Brexit* dengan menghasilkan proposal *Backstop*. Proposal tersebut melewati banyak perdebatan khususnya pada parlemen Inggris Raya. Lalu pada masa Boris Johnson direvisi menjadi *Northern Ireland Protocol*.

Kerangka berpikir yang dijelaskan oleh Snyder, digunakan untuk meninjau apa yang melatar belakangi diterbitkannya kebijakan *Northern Ireland Protocol* ini. Dimana dengan menggunakan teori *decision making*, peneliti dapat mengelompokkan faktor pendorong dalam penerbitan *Northern Ireland Protocol* dimana memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Secara umum, peneliti melihat bahwa permasalahan dalam pengambilan kebijakan diperbatasan tersebut dikarenakan Irlandia Utara (Inggris Raya) dan Republik Irlandia (Uni Eropa) memiliki perbatasan darat. Dalam fenomena *Brexit* ini perbatasan tersebut harus memiliki kesepakatan baru karena Uni Eropa memiliki standar terhadap apa saja yang akan melewati perbatasan keanggotaannya. Selain menjaga hubungan dengan Uni Eropa, Inggris Raya harus mampu mempertimbangkan *output* kesepakatan yang akan dicantumkan pada Irlandia Utara. Pada masa bakti Theresa May dimana setelah adanya kompromi, *Backstop* dibuat menjadi jaminan

sampai adanya alternatif baru. Kesepakatan ini masih banyak ditolak dikarenakan akan membuat Irlandia Utara condong pada peraturan Uni Eropa dan Inggris Raya akan tetap masuk pada *Custom Union* untuk menjaga keterbukaan perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Setelah banyak kendala yang dialami oleh Theresa May dalam memasukan proposal *Backstop* kedalam *withdrawal agreement*, Theresa May mengundurkan diri. Pengunduran diri ini akhirnya di gantikan oleh Boris Johnson.

Pada masa pemerintahan Boris Johnson, Johnson merevisi kebijakan tersebut karena dinilai tidak demokratis. Kebijakan tersebut adalah *Northern Ireland protocol*. Peneliti menggunakan teori *decision making* dalam peninjauan latar belakang ini dengan mengambil pemahaman dari Snyder dimana adanya faktor internal dan faktor eksternal. Peneliti akhirnya mengelompokkan bahwa dalam faktor internal terdapat 3 faktor pendorong yaitu domestik, letak geografis, dan keunikan histori sedangkan dalam faktor eksternal utamanya dorongan dari Uni Eropa.

Dalam penelitian ini bisa di simpulkan bahwa pada faktor domestik di dominasi oleh peran partai konservatif sebagai partai terbesar dan DUP sebagai partai yang dekat dengan Irlandia Utara. Faktor letak geografis didominasi oleh keluarnya Inggris Raya membuat perbatasan eksternal dengan salah satu anggota Uni Eropa yaitu Republik Irlandia, dimana antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia terpisah karena adanya *The Irish Free State 1922*. Faktor keunikan histori merupakan hal yang paling mendominasi fokus negosiasi *Brexit* dimana hal ini dikarenakan dahulunya diperbatasan pulau Irlandia adanya *the trouble* yang menghasilkan *Good Friday Agreement*. *Good Friday Agreement* adalah penopang upaya perdamaian di perbatasan tersebut, dengan adanya potensi perbatasan fisik akan mengancam perdamaian tersebut.

Secara singkat, Inggris Raya harus bisa menempatkan kebijakan yang tepat pada perbatasan tersebut karena bisa memicu adanya ketidakstabilan perbatasan tersebut. *Brexit* bagi masyarakat di wilayah perbatasan terbukti tidak hanya diukur dari segi ekonomi saja karena perbatasan tersebut memiliki makna emosional dan simbolis. Dengan adanya kebijakan yang tepat akan menjaga semua indikator-indikator yang

bersangkutan. Dengan mengangkat NIP untuk kebijakan *withdrawal agreement* perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia hal tersebut sudah bisa mengakomodir kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan dalam perbatasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Connelly, Tony. 2018. *Brexit and Ireland: The Dangers, The Opportunitites, and The Inside Story of Irish Response*. Penguin: Ireland.

Mintz, Alex. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press: Cambridge

Murray, Colin, dkk. 2018. *Bordering Two Union*. Policy Press: Great Britain.

Oliver ,Tim. 2018. *Understanding Brexit*. Policy Press: Great Britain .

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung. 2009

Snyder ,Richard C., Bruck ,H.W. Bruck, Sapin., Burton.2002. *Foreign Policy Decision Making (Revisited)*. Hampshire: Palgrave.

Jurnal:

Balawajder, Grzegorz. 2020. “ The British-Irish Border in The Context of Brexit”. *Przegląd Strategiczny: University of Opole* , Vol.13, Januari 2020. Hal 232-234

Byrne ,Sean. 2022. “Building Peace n Northern Ireland : Hopes for the Future”, *Sage Journal*, Vol 0 (0),No1- 20. Hal 2-5

Starr ,Harvey. 2006. “*International Border: What They Are, What They Mean, and What We Should Care*”. SAIS. Vol 26, No.1,Januari 2006. Hal 3-8

- Hayward ,Katy, Komarova ,Milena. 2018. “*The Border Into Brexit*”. Queen’s University Belfast. Belfast. Hal 16
- Mahardika, Fajar. 2020. “Dampak *Brexit* terhadap Hubungan Bilateral Inggris Raya-Irlandia“. JOM FISIP. Vol 7. No.2. Juli-Desember 2020. Hal
- Starr ,Harvey. 2006. “*International Border: What They Are, What They Mean, and What We Should Care*”. SAIS. Vol 26, No.1, Januari 2006. Hal
- Tomkins, Leah. 2020. “*Where is Boris Johnson? When and why it matters that leaders show up in a crisis*”. *Sage Journal*. Vol.16, No.3. United Kingdom. Hal 333
- Ulfa ,Nadlirotul, dkk. 2018. “*Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review*”. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*. Vol.1, Januari 2018. Hal 82-83
- Walsh, Cormac. 2019. ‘Brexit Geographies: Spatial Imaginaries and Relational Territorialities on the Island of Ireland’. *Geography Society of Ireland*. November 2019. Vol 52, No. 2. Hal 138.
- Xing, Yang. 2015. “Analysis of Political Decision-Making and its Influencing Factors”. *Jurnal Cross Cultural Communication*, Vol.11, No. 3, Februari 2015. Hal 42

Artikel:

- Asthana, Anuska. 2017. “Theresa May faces backlash from Scotland and Wales over £1bn Tory-DUP deal”. <https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/26/tories-and-the-dup-reach-deal-to-prop-up-minority-government>. Diakses pada Agustus 2022.

- BBC. 2019. "Brexit: DUP endorses Johnson's offer to European Union". <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-49910285>. Diakses pada Juli 2022.
- BBC. 2019. "Brexit: What is in Boris Johnson's new deal with the EU?". <https://www.bbc.com/news/uk-50083026>. Diakses pada Juli 2022.
- BBC. 2022. "The Northern Ireland Protocol: What does each side want?". <https://www.bbc.com/news/uk-politics-61477844>. Diakses pada Juni 2022.
- BBC. 2022. "Why is the DUP against the Northern Ireland Protocol?". <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-61366306>. Diakses pada Juni 2022
- Baczynska, Gabriela. 2019. "EXPLAINER-A guide to the Brexit Backstop, and why there's a UK-EU standoff". <https://www.reuters.com/article/britain-eu-Backstop-idUSL5N25G27Y>. Diakses pada Juli 2022.
- Campbell, John. 2019. "Q&A: How does the border plan differ from the Backstop?". <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-49912310>. Diakses pada Juli 2022.
- Claire, Marie. 2020. "*Brexit and the Irish Border Issue: from May's deal to Johnson's Deal*". <https://journals.openedition.org/osb/4823>. Diakses pada 27 Januari 2022
- Carroll, Rory. 2019. "DUP accepts 'need to be flexible' over demands for Brexit deal". <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/11/brexit-deal-northern-ireland-dup-border-arlene-foster>. Diakses pada Agustus 2022.
- Carroll ,Rory.2020. "*It becomes immense': one man's solo effort to document every death in the Troubles*". <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/19/malcolm-sutton-solo-effort-document-every-death-in-the-troubles>. Diakses pada tanggal 14 November 2021.

- European Council. 2017. “ European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations”. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexite-guidelines/>. Diakses pada Juni 2022.
- Ferguson, Amanda. 2021. “DUP threatens to collapse N.Ireland government over Brexit checks”. <https://www.reuters.com/world/europe/nirelands-dup-threatens-collapse-regional-govt-over-brexite-protocol-2021-09-09/>. Diakses Agustus 2022.
- Saviar ,Yulyani Maharta. 2018. “Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Raya dari Keanggotaan Uni Eropa. <https://repository.unair.ac.id/67835/> Diakses pada Agustus 2022.
- Sullivan ,Arthur. 2021. “*Brexit has threatened the peace in Northern Ireland*”.<https://amp.dw.com/en/brexit-has-threatened-the-peace-in-northern-ireland/a-57157557>. Diakses pada 9 Januari 2022
- Spacia ,Megan, ,Mueller Benjamin. 2019. “ *What do Ireland and Northern Ireland want from Brexit*”. <https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/europe/ireland-northern-ireland-brexit-Backstop.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021
- 2018.”*What was the Good Friday Agreement*” <https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021
- European Commision. 2018. “*Free movement – EU National*”. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457> . Diakses pada tanggal 27 November 2021
- FPCI UI. 2018. „Dampak Brexit terhadap Disintegrasi Irlandia“. <https://medium.com/over-the-world/dampak-brexit-terhadap-disintegrasi-irlandia-4b866fae3294>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021

- ITV News. 2019. "How did the DUP become a key player in the Brexit process?" .
<https://www.itv.com/news/2019-10-16/how-dup-became-key-player-in-brexit-process>. Diakses pada Juni 2022
- John, Tara. 2017. "British Elections: What to Know About the Democratic Unionist Party".
<https://time.com/4812448/uk-election-who-are-the-democratic-unionist-party/>. Diakses pada Juni 2022
- Kirby, Jen. 2019. „*Brexit’s Irish Border Problem, Explained*“. <https://www.vox.com/world/2019/2/18/18204269/brexit-irish-border-Backstop-explained>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021
- Kirby, Jen. 2019. "British Prime Minister Theresa May’s Brexit agreement fails for a third time".
<https://www.vox.com/world/2019/3/29/18285930/brexit-deal-defeated-parliament-theresa-may-third-time>. Diakses pada Agustus 2022
- . 2019. "*Brexit: Theresa May’s Dealis Voted Down in Historic Commons Defeat*".
<https://www.bbc.com/news/uk-politics-46885828> . Diakses 30 Januari 2022
- McGee, Luke. 2019. "A legacy of failure: Theresa May was a disaster as Prime Minister".
<https://edition.cnn.com/2019/05/24/uk/theresa-may-legacy-of-failure-analysis-intl-gbr/index.html>. Diakses pada agustus 2022.
- Meredith, Sam. 2022. "UK confirms plans to change post-Brexit trade rules, risks retaliation from Europe".
<https://www.cnbc.com/2022/05/17/brexit-uk-confirms-plans-to-make-changes-to-northern-ireland-protocol.html>. Diakses pada Juni 2022.
- Mudge Rob. 2020. "*Brexit Timeline: From Doom to Dust*".
<https://www.dw.com/en/brexit-timeline-from-doom-to-dust/a-55956451>.
Diakses pada 29 Januari 2022

- Reuters Staff. 2019. “*Factbox: What is the Irish ‘Backstop’ at the heart of Brexit Impasse?*”. <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-Backstop-factbox-idUSKCN1UL265>. Diakses pada 30 Januari 2022
- Skoutris, Nikos. 2018. “*‘Backstop’ option for Irish Border after Brexit – The Difference between EU and UK Proposal Explained*”. <https://theconversation.com/Backstop-option-for-irish-border-after-brex-it-the-difference-between-eu-and-uk-proposals-explained-97963>. Diakses pada 29 Januari 2022.
- Taylor, Ros. 2017. “The DUP scuppered a Brexit deal for all the wrong reasons”. <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/12/07/the-dup-scuppered-a-brexit-deal-for-all-the-wrong-reasons/>. Diakses pada Juni 2022.
- Turak, Natasha. 2017. “The Irish border and Brexit: Here’s what you need to know”. <https://www.cnbc.com/2017/12/06/irish-border-and-brexit-heres-what-you-need-to-know.html>. Diakses pada Agustus 2022.
- Uberoi, Elise. 2016. “Analysis of the EU Referendum results 2016”. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7639/> . Diakses pada 18 Februari 2022.
- O’carrol, Lisa. 2019. “*Boris Johnson and Leo Varadkarsay they ‘see the pathway’ to Brexit deal*”. <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/10/boris-johnson-and-leo-varadkar-say-they-see-pathway-to-brexit-deal> . Diakses 30 Januari 2022
- Owen, Joe. 2019. “ Boris Johnson’s Backstop Letter”. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/boris-johnsons-Backstop-letter>. Diakses pada Juli 2022.

Laporan:

Russell, Martin. 2020. 'Northern Ireland After Brexit'.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649416/EPRS_BRI\(2020\)649416_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649416/EPRS_BRI(2020)649416_EN.pdf). Brussel:European Parliament.

Hayward, Katy. 2017. 'The Irish Border and Brexit: An Explainer, Parts I & II'.
<https://www.qub.ac.uk/brexit/Brexitfilestore/Filetoupload,737794,en.pdf>.
Brussel: UK in a changing Europe.

Cirlig, Cristina. 2019. 'The revised Brexit deal: What has change and next steps?'.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642260/EPRS_BRI\(2019\)642260_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642260/EPRS_BRI(2019)642260_EN.pdf). Brussel:European Parliament.

Blancett, Chris. 2020. 'Insight for new Parliament: Impartial analysis of the key issues'.
https://commonslibrary.parliament.uk/content/uploads/2020/01/HoP_Insights_Publication_FULL1.pdf#page=108. London:House of Commons.

the Secretary of State for Northern Ireland. 2021. 'Northern Ireland Protocol: the way forward'.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1008451/CCS207_CCS0721914902-005_Northern_Ireland_Protocol_Web_Accessible_1.pdf. United Kingdom:
HM Government

House of Commons. 2022. 'Northern Ireland Protocol Bill: Explanatory Notes'.
<https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0012/en/220012en.pdf>.
United Kingdom: House of Commons.

The secretary of state for Northern Ireland. 1988. 'The Belfast Agreement: An Agreement Reached at the Multi-Party Talks on Northern Ireland'.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034123/The_Belfast_Agreement_An_Agreement_Reach

ed at the Multi-Party Talks on Northern Ireland.pdf. Brussel: Northern Ireland
parliament

Hayward, Katy, Komarova ,Milena. 2022. “ The Protocol on Ireland/Northern Ireland:
Past, Present, and Future Precariousness”.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.13079>. Global
Policy. United Kingdom. Hal 130-132

